

**ANALISIS MANAJEMEN ASET DAERAH DALAM  
PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DI  
KABUPATEN LAMONGAN  
(Studi Tentang Aset Tetap Berwujud Objek Wisata Daerah)**

**Oleh :**

**Richard Izaac Risambessy**

Alumni Mahasiswa Program Doktor Ilmu Ekonomi  
Program Pascasarjana Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

***ABSTRACT***

*The aim of this research is to discover and analyze: (1) The influence of district assets controlling system to the empowerment of district assets; (2) The influence of district asset accounting to the empowerment of district assets; (3) The influence of district's asset empowerment to the performance of district assets; (4) The influence of the district assets performance to the district's genuine revenue; (5) The influence of district assets accounting to the district assets controlling system; (6) The influence of district assets controlling system to the district asset performance; (7) The influence of district assets accounting to the districts asset performance; (8) The influence of district asset controlling system to the district genuine revenue; (9) The influence of district asset accounting system to the district genuine revenue.*

*The results of the research conducted, discovered that: 1). District asset controlling system has significant positive influence to the empowerment of district asset; 2) District asset accounting system has non significant positive influence to the empowerment of district asset; 3) The empowerment of district asset has non significant positive influence to the districts asset performance; 4) The performance of district asset has significant positive influence to the district's genuine revenue; 5) District asset accounting has significant positive influence to district asset controlling system; 6) District asset controlling system has non significant positive influence to district asset performance; 7) District asset accounting system has non significant positive influence to the*

*district asset performance; 8) District asset controlling system has non significant positive influence to district actual income; 9) accounting system of district asset has non significant positive influence to district actual income.*

**Key words:** *The Empowerment Of District Assets, Management Control Of District Assets, District Asset Accountancy, District Actual Income.*

## **Pendahuluan**

### **Latar Belakang Masalah**

Kewajiban bagi pemerintah daerah otonom adalah melakukan suatu bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan pemerintahan di daerahnya secara periodik, oleh karena itu bentuk pertanggungjawaban tersebut wajib memenuhi syarat dan petunjuk yang telah digariskan sesuai dengan undang-undang dan peraturan pemerintah yang telah ada. Semua hal tersebut diwajibkan agar suatu pemerintah daerah otonom dapat dikatakan telah memenuhi syarat-syarat yang akuntabel serta transparan sesuai dengan semangat reformasi dan demokrasi, guna memenuhi persyaratan proses penyelenggaraan pemerintahan yang bersih.

Pertanggungjawaban dan proses pengelolaan keuangan daerah maupun keuangan negara, hingga kini masih diperbincangkan, baik di dalam lingkup akademik maupun publik serta masyarakat pada umumnya, karena negara sebagai sebuah badan hukum publik pada umumnya mempunyai kewajiban-kewajiban yuridis dan administratif dalam hal penyelenggaraan dan pengelolaan serta pertanggungjawaban keuangan negara, seperti penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) serta proses perencanaan pembangunan dan sebagainya.

Perkembangan ekonomi Kabupaten Lamongan dengan 27 kecamatan, dan 462 desa, serta jumlah penduduk pada tahun 2007 sebesar: 1.412.386 jiwa, apabila dilihat dalam peta kawasan Gerbangkertosusila, maka ternyata posisi Kabupaten Lamongan juga cukup berarti yaitu dengan tingkat pertumbuhan sebesar 6,58 % pada tahun 2006 menduduki rangking ke 4 dari 7 daerah di kawasan ini, dimana tingkat pertumbuhan kawasan ini memiliki tingkat

pertumbuhan ekonomi diatas rata-rata pertumbuhan ekonomi Jawa Timur sejak tahun 2002 sampai dengan tahun 2006.

**Tabel 1**

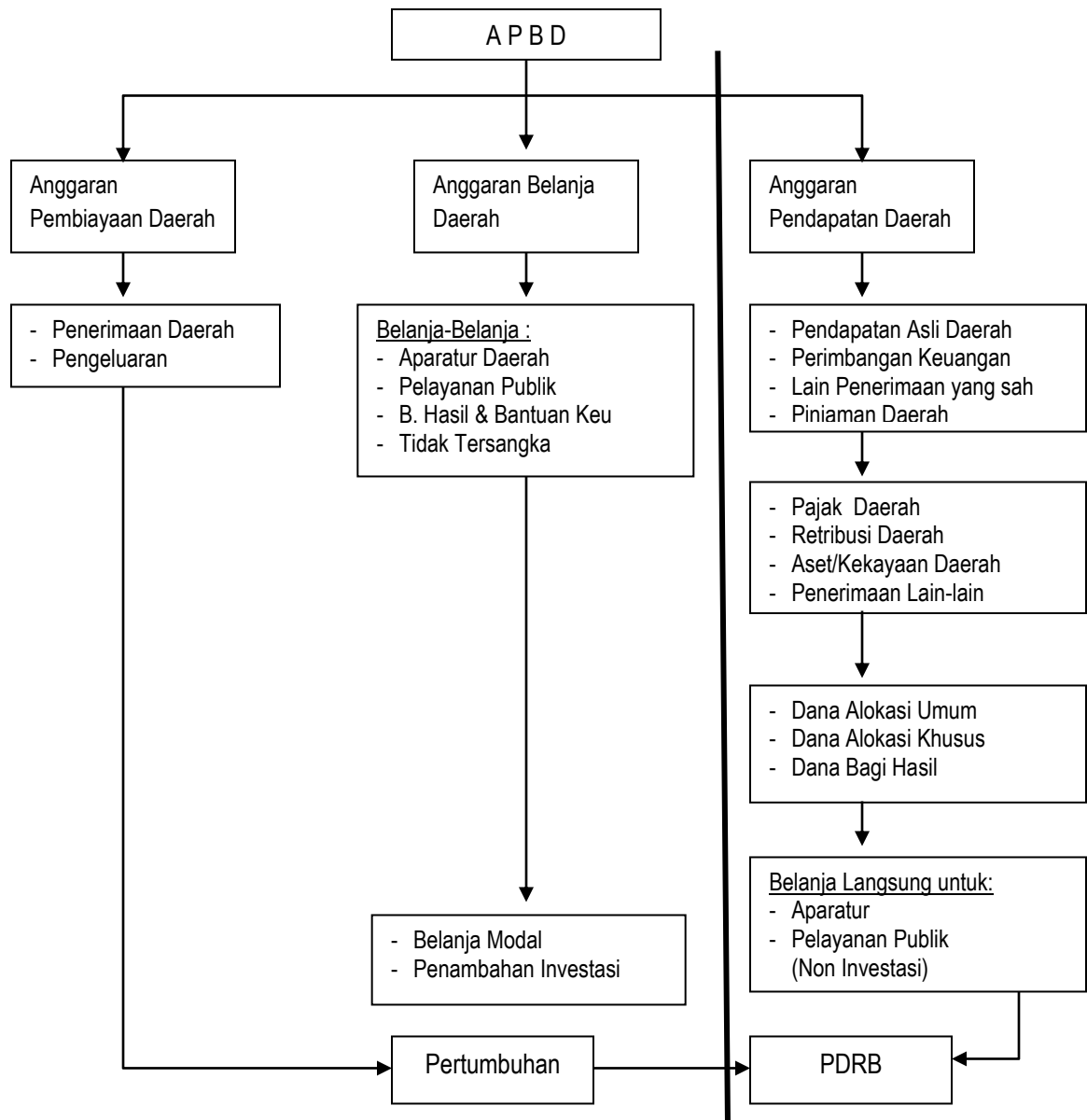
**Perkembangan PDRB Jawa Timur Menurut Lapangan Usaha atas Dasar Harga Berlaku Periode Tahun : 2002 s/d 2006  
(Dalam Jutaan)**

<b>Tahun</b>	<b>Total PDRB Tahunan</b>	<b>Kenaikan</b>	<b>%</b>
2002	267.157.716,58	---	---
2003	300.609.858,00	33.452.141,42	12,52
2004	341.065.251,34	40.455.393,34	13,46
2005	403.392.350,74	62.327.099,40	18,27
2006	470.627.493,63	67.235.142,89	16,67

Sumber: BPS Jatim : Katalog .9203.35

Perkembangan pendapatan *domestic regional brutto* (PDRB) yang disajikan diatas menggambarkan adanya suatu peningkatan ekonomi regional di Jawa Timur yang cukup signifikan dari tahun 2002 sampai dengan 2006, yang dalam hal ini peran serta daerah Kabupaten Lamongan termasuk cukup signifikan dan berarti, hal ini yang menjadi dasar yang kuat bagi kami untuk meneliti dan mencoba untuk mengkaji dan menganalisa hal tersebut secara komprehensif dalam penelitian ini, terutama dengan adanya perkembangan aset daerah yang dimiliki.

**Gambar 1**  
**Struktur dan Elemen Keuangan Daerah**

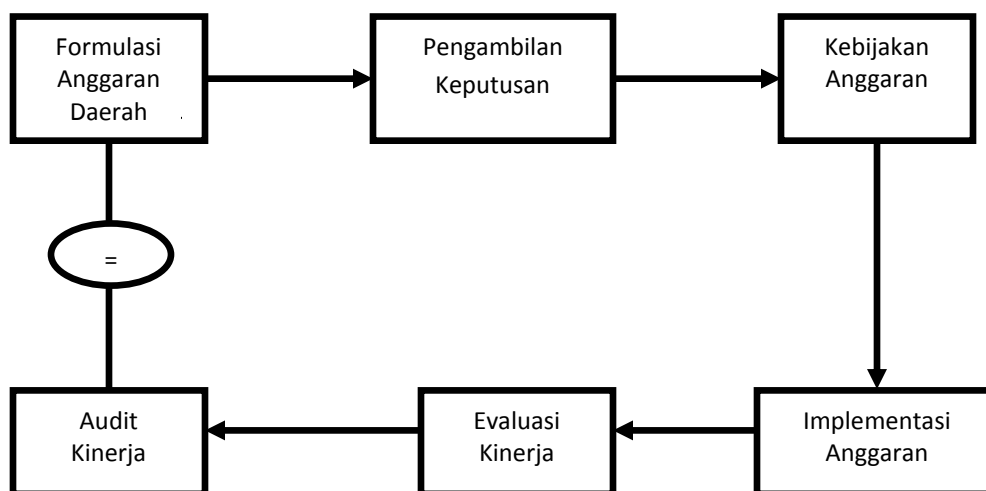


Sumber : Ujianto, Ekonomi Pembangunan, diolah penulis

Guna memperoleh suatu hasil yang baik dalam pengelolaan keuangan pemerintah daerah, maka proses pengelolaan keuangan daerah juga perlu selalu dievaluasi dan diaudit dalam suatu mekanisme manajemen keuangan yang terstruktur. Untuk itu, maka model pengelolaan keuangan daerah yang baik nampak pada gambar berikut ini.

**Gambar 2**

**Model Pengelolaan Keuangan Daerah**



Sumber : Ujianto, Ekonomi Pembangunan, diolah penulis

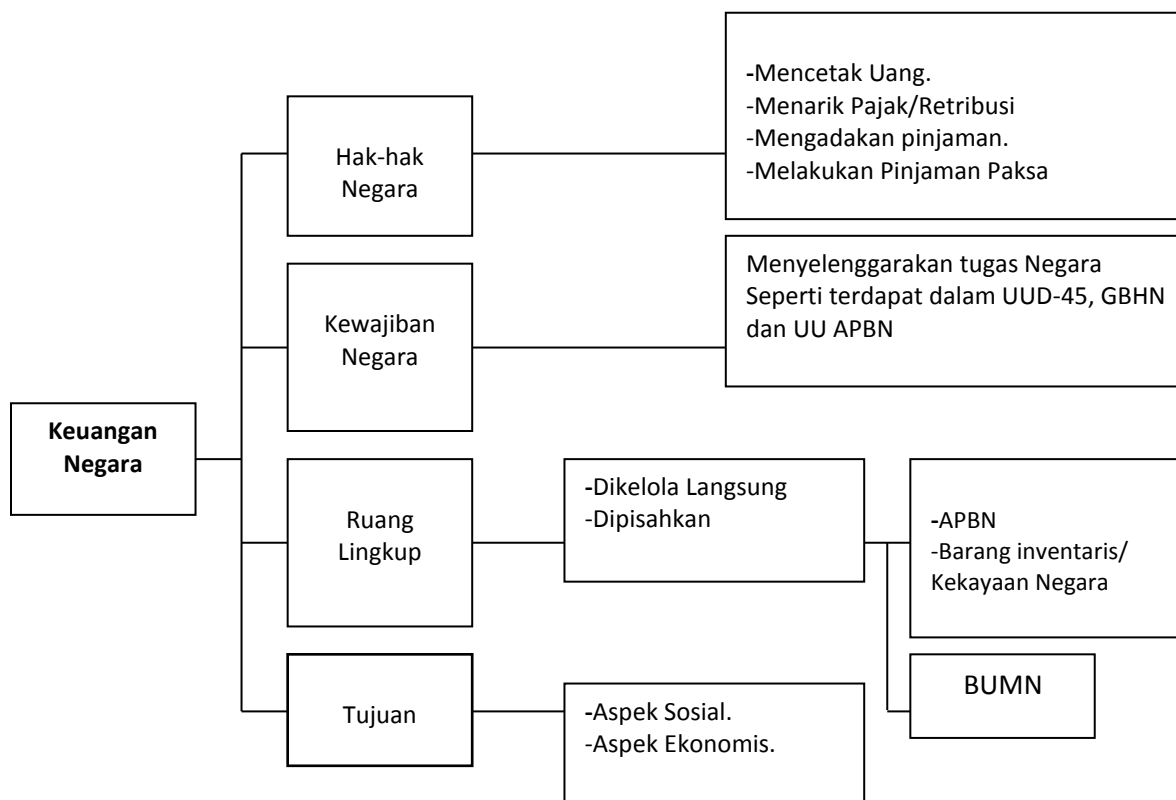
Dari gambar 2 diatas, terlihat bahwa evaluasi kinerja keuangan daerah meliputi semua kegiatan keuangan pemerintah daerah, dan harus selalu dilakukan dalam rangkaian suatu sistem pengelolaan keuangan daerah. Dimana dalam pemeriksaan dimaksud, adalah pemeriksaan atas segala kegiatan manajemen pemerintahan daerah yang dilakukan sesuai dengan syarat-syarat pengelolaan keuangan yang baik yang meliputi semua sistem pertanggung jawaban dan dilakukan sesuai dengan PP Nomor. 56/2005 tentang sistem informasi keuangan daerah dan disajikan sesuai dengan PP Nomor. 58/2005

tentang pengelolaan keuangan daerah. Semua model pertanggungjawaban oleh pemerintah daerah di atas, harus mendapat persetujuan masyarakat daerah tersebut melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), dengan demikian proses evaluasi kinerja keuangan di atas, mencerminkan adanya proses *Good Corporate Governance*, serta merupakan suatu bentuk pertanggung jawaban publik dari pemerintah daerah tersebut.

Manajemen keuangan daerah dapat pula dilihat dari segi tata usaha administrasi keuangan daerah. Dari sudut pandang tersebut akuntansi keuangan daerah merupakan salah satu jenis tata usaha yaitu tata usaha keuangan, atau yang sering disebut sebagai pembukuan. Oleh karena lingkup keuangan daerah merupakan bagian dari lingkup keuangan negara, maka semua pelaksanaannya harus berdasarkan Undang-Undang. Menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara, yang dimaksud dengan keuangan negara adalah: semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.

Ruang lingkup keuangan negara dapat dikelompokkan menjadi-menjadi, yaitu: yang dikelola langsung oleh pemerintah dan yang dipisahkan pengurusannya (Abdul Halim-2004, 10–11). Ruang lingkup keuangan negara adalah: semua unsur keuangan atau kekayaan yang menjadi tanggungjawab negara. Sedang keuangan negara yang dikelola langsung oleh pemerintah pusat adalah komponen keuangan negara yang mencakup seluruh penerimaan dan pengeluarannya, dalam hal ini adalah APBN, sedangkan hal yang sama pada tingkat daerah adalah APBD. Uraian pengelolaan keuangan negara diatas, dapat digambarkan dalam unsur-unsur pokok keuangan negara (Abdul Halim, 2004 -11) sebagai berikut:

**Gambar 3**  
**Unsur Pokok Keuangan Negara**



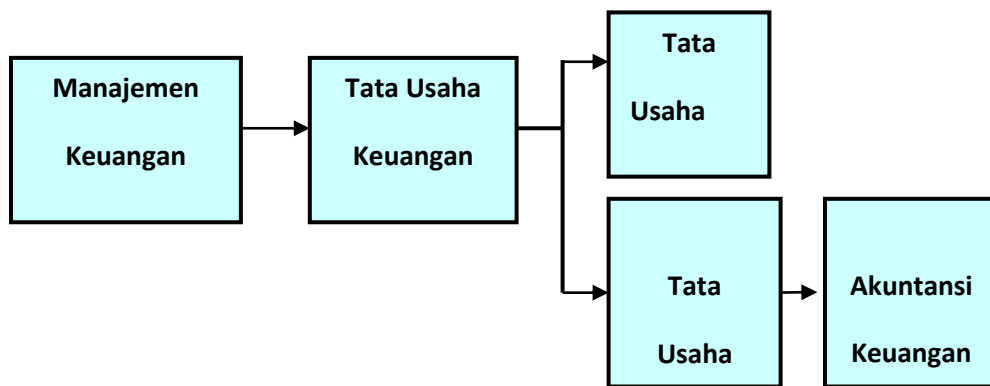
Sumber : Abd. Halim, 2004, Akuntansi Keuangan Daerah

Pengertian tentang manajemen keuangan daerah diatas merupakan sebagian dari beberapa pengertian manajemen keuangan daerah yang ada, sebab salah satu pengertian manajemen keuangan daerah selain pengertian diatas adalah defenisi manajemen keuangan daerah sebagai usaha-usaha yang dilakukan manajemen, yakni pemerintah daerah dalam membelanjakan dana milik daerah sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik daerah tersebut dan

dalam mendapatkan dana yang dibutuhkan untuk membiayai pengeluaran tersebut. Oleh karena manajemen keuangan daerah diatas adalah mengurus dana atau uang yang merupakan kekayaan daerah, maka manajemen keuangan ini harus dapat di tata dalam suatu akuntansi keuangan daerah yang rapidan bertanggungjawab, untuk itu maka hubungan dan kedudukan hubungan ini nampak pada gambar sebagai berikut:

**Gambar 4**

**Hubungan Manajemen Keuangan Daerah & Akuntansi Keuangan Daerah**



Sumber : Sumber : Abd. Halim, 2004, Akuntansi Keuangan Daerah

Dari hubungan manajemen keuangan daerah di atas, maka terlihat bahwa suatu manajemen keuangan daerah yang dijalankan akhirnya harus dapat tergambarkan dan bermuara dalam suatu akuntansi keuangan yang baik dari suatu penatausahaan keuangan yang dipersyaratkan. Dengan demikian maka akuntansi keuangan daerah, dengan adanya hubungan tersebut di atas, harus dapat menyajikan suatu data akuntansi yang dapat dipercaya dan memiliki makna yang dapat memberikan interpretasi yang baik bagi manajemen keuangan daerah.

Dengan adanya susunan penerimaan dan pengeluaran daerah yang ada di atas, maka dapat dilihat bahwa semua hubungan penerimaan dan pengeluaran tersebut harus dapat dilakukan dalam suatu manajemen keuangan



yang rapi dan terukur, oleh karena itu maka setiap manajemen keuangan daerah harus dapat membuat ukuran-ukuran atau standar-standar penilaian yang baku terhadap kinerja keuangan daerah dimaksud.

Untuk maksud tersebut, maka ada beberapa alat ukur dalam pengelolaan manajemen keuangan daerah yang lazim dipergunakan untuk menilai kinerja keuangan tersebut antara lain: Rasio Kemandirian, Rasio Efektivitas, Rasio Aktivitas dan Rasio Pertumbuhan. Selanjutnya fungsi rasio-rasio di atas adalah memberikan gambaran yang berbeda bagi manajemen keuangan pemerintah di daerah tersebut untuk menilai kinerja keuangannya. Sebab dengan gambaran yang diberikan oleh tiap rasio di atas, akan memberikan makna yang utuh dari sistem pengelolaan keuangan di daerah tersebut secara gamblang bagi manajemen keuangan daerah, yang selanjutnya dapat diambil tindakan yang perlu untuk memperbaikinya.

#### **a. Aset Daerah dalam Pendapatan Asli Daerah**

Secara konseptual, Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber utama keuangan daerah, karena sumber keuangan daerah yang baik seharusnya berasal dari kemampuan daerah tersebut dalam membelanjai dirinya sendiri dari hasil yang diperoleh dalam daerah tersebut, maka sudah sepantasnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) ini menjadi suatu patokan dan titik awal dari setiap formulasi keuangan pemerintah daerah dalam membuat rencana anggaran belanja daerahnya (RAPBD). Hal ini karena akan menunjukkan kemandirian daerah tersebut dalam mengelola keuangannya sendiri, dan apabila jumlah pendapatan asli tersebut kurang memadai untuk keperluan daerah sendiri, maka kemudian peranan pemerintah pusat untuk memberikan partisipasi pembangunan berupa Dana Perimbangan (DP) yang merupakan suatu bentuk bantuan pemerintah pusat bagi daerah, sesuai dengan formula tertentu yang ditentukan oleh pemerintah pusat.

Pemerintah Kabupaten Lamongan pada dasarnya ingin untuk lebih mengedepankan unsur utama dalam rencana anggaran dan pendapatan daerah (RAPBD) yang berasal dari pendapatan asli daerah secara dominant, oleh karena itu pendapatan asli daerah biasanya berbentuk penggalan sumber dana dan kekayaan yang digali dari daerah itu sendiri. Dalam konsep tersebut, maka formulasi pendapatan asli daerah sesuai dengan undang-undang yang ada saat ini (UU. Nomor : 33 / 2004) ini terdiri dari:

1. Pajak Daerah (PD).
2. Retribusi Daerah (RD).
3. Aset/Kekayaan Daerah.
4. Lain-lain pungutan daerah yang sah menurut undang-undang.

Sumber pendapatan diatas menggambarkan bagaimana daerah tersebut mengeksploitasi daerahnya sendiri dengan semua sumber-sumber yang ada demi untuk memperoleh pendapatan dari dalam daerah itu sendiri. Hal ini tentu memiliki keterbatasan karena potensi pendapartan tersebut akan kembali kepada daerah itu sendiri, apakah memiliki kemampuan untuk meningkatkan aktifitas ekonomi atau tidak yang selanjutnya secara *multiplier effect* akan dapat memberikan efek ganda pada kemampuan pemerintah untuk menggali sumber-sumber pendapatan di atas, berupa pajak dan retribusi daerahnya.

#### **b. Pengukuran Kinerja Keuangan Daerah**

Merupakan suatu prinsip yang baik apabila setiap aktivitas yang dilakukan dalam suatu suatu lembaga atau badan, kemudian aktivitas tersebut diukur tingkat keberhasilannya. Hal ini akan lebih memudahkan proses pengendalian bagi manajemen dalam lembaga atau badan tersebut terhadap tiap langkah kerja dan kegiatannya. Kinerja menggambarkan suatu hasil kerja yang dapat dicapai oleh seseorang atau kelompok orang dalam suatu organisasi atau badan, sesuai dengan wewenang dan tanggungjawabnya masing-masing dalam rangka mencapai tujuan organisasi bersangkutan secara legal, dan tidak melanggar hukum dan sesuai dengan moral dan etika (Prawirosentono, 1992 : 2).

Dalam suatu organisasi keuangan pemerintahan daerah yang tugas dan fungsinya untuk mengendalikan dan mengelolah aktivitas keuangan didaerah, maka sudah sewajarnya segala tugas dan wewenang serta kegiatan organisasi ini harus diukur agar hasil pengukuran tersebut dapat dipakai sebagai bahan evaluasi guna memberikan gambaran yang lebih terinci dan luas tentang bagaimana pengelolaan keuangan daerah itu dilakukan serta berapa besar keberhasilannya atau kerugiannya bagi organisasi.

### **c. Sistem Pengawasan Keuangan Daerah**

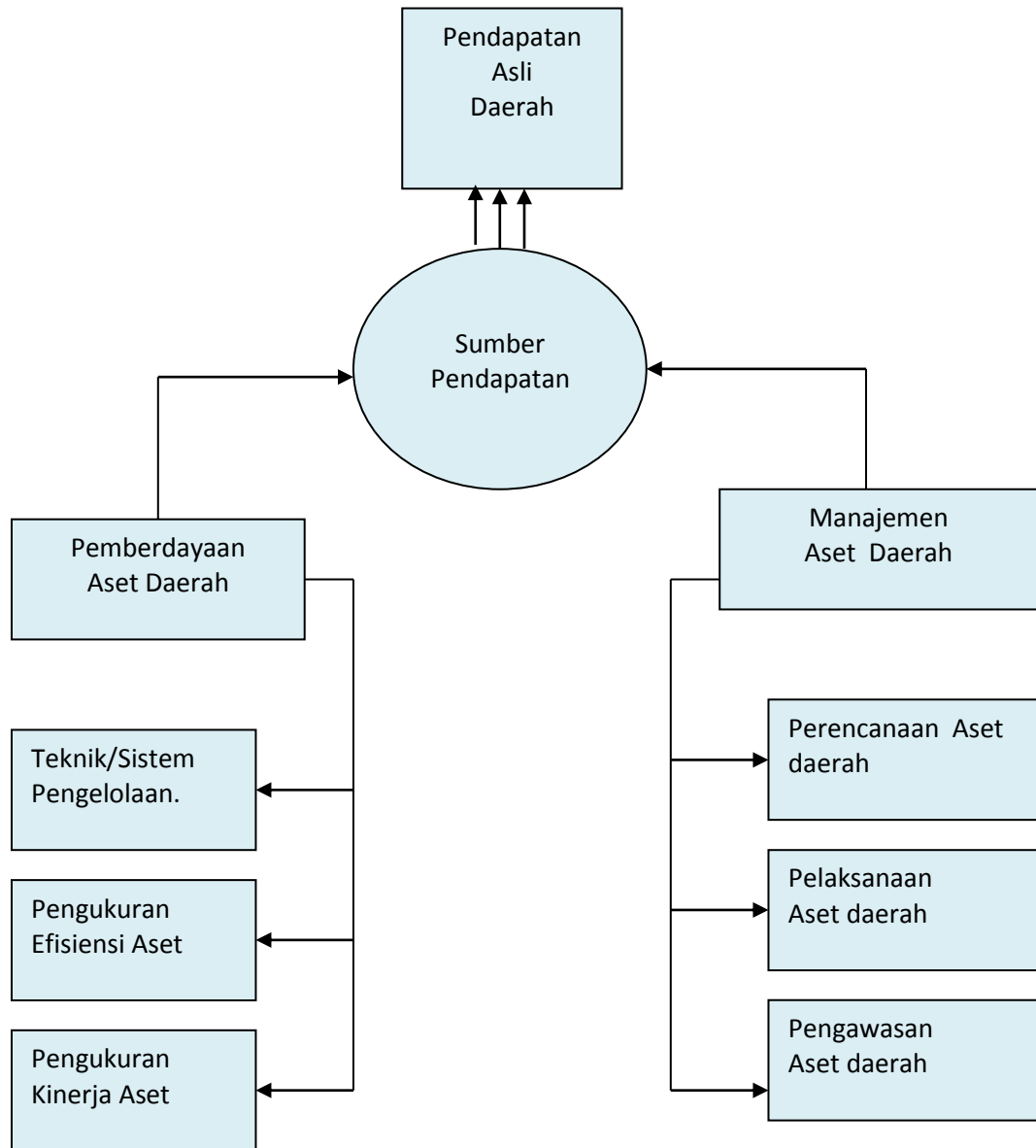
Manajemen keuangan suatu daerah umumnya menyelenggarakan aktivitas yang berhubungan dengan pengurusan penerimaan keuangan dan pembelanjaan/penggunaan keuangan daerah yang dilakukan sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan. Dengan demikian maka penyelenggaraan keuangan tersebut harus dapat diketahui oleh setiap otoritas pemerintah daerah tersebut yang meliputi: Pemerintahan Daerah/Pemda (Eksekutif) maupun Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Legislatif).

### **d. Sistem Pertanggungjawaban Keuangan Daerah**

Menjadi persyaratan dari setiap sistem pengawasan adalah diwajibkan bagi penyelenggara sistem untuk mempertanggungjawabkan hasil pengelolaannya yang telah dilaporkan dalam laporan pertanggung jawaban. Bentuk pertanggung jawaban keuangan daerah adalah suatu bentuk pertanggungjawaban yang diatur dengan Undang-Undang (UU) serta pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Pemerintah (PP). Untuk memenuhi maksud diatas, maka Undang-Undang No.15 tahun 2004 tentang: Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara diminta untuk setiap pelaksana anggaran wajib:

1. Manata usahakan (Akuntansi) setiap aktivitas anggaran dalam suatu catatan yang telah ditentukan, sesuai dengan PP. No. 24 tahun 2005 & PP. No. 58 tahun 2005.
2. Menyimpan semua dokumentasi serta catatan lain yang berhubungan dengan setiap aktivitas sumber pendanaan maupun pembelanjaan dan pembiayaan.
3. Menyiapkan informasi yang relevan dan handal untuk pengungkapan lengkap dan wajar tentang realisasi serta substansi bentuk formal secara konsisten sebagai pelengkap pelaporan keuangan yang ada.
4. Menyiapkan laporan kegiatan tepat waktu dan berkualitas, serta dapat dijabarkan untuk berbagai penggunaannya.
5. Menjaga kerahasiaan data keuangan serta wajib memelihara semua informasi keuangan untuk kelangsungan kegiatan keuangan daerah dimasa yang akan datang.

Gambar 5

**Model Hubungan Pendapatan Asli Daerah  
Dengan Pengelolaan Aset Daerah**

Sumber : PP. No.56 tahun 2005 diolah penulis

Dari model hubungan di atas, nampak bahwa pengelolaan aset daerah memiliki peran dan posisi yang cukup berarti dalam membentuk dan menentukan pendapatan asli daerah (PAD) bagi suatu daerah otonom. Dengan demikian bentuk-bentuk pengelolaan serta pemberdayaan aset daerah menjadi mutlak penting untuk dikendalikan dalam suatu manajemen aset daerah yang baik dan bertanggungjawab. Karena dalam hubungan ini terlihat bahwa sumber pendapatan daerah bisa dibentuk dari unsur-unsur pemberdayaan aset dan manajemen aset daerah. yang kemudian dapat dijelaskan secara terperinci bahwa unsur pemberdayaan aset, dilakukan melalui beberapa langkah antara lain:

1. Tehnik dan sistem pengelolaan aset yang harus ditentukan terlebih dahulu, yang meliputi: Bagaimana bentuk badan pengelolaan aset tersebut, apakah dikelola secara mandiri oleh pemerintah daerah setempat atau dikelola secara bersama dengan pihak swasta nasional sebagai partner kerja dalam pembangunan aset tersebut, dan selanjutnya penentuan bagaimana manajemen aset ini melakukan sistem dan prosedur kerja badan pengelolaan aset tersebut dalam kedudukannya terhadap pemerintah daerah otonom, baik meliputi Administrasi, akuntansi dan pertanggung jawaban manajemen pengolahan aset daerah kepada pemerintah daerah setempat.
2. Penentuan prinsip-prinsip pengukuran keberhasilan pengelolaan aset daerah dimaksud, yang meliputi: pengukuran kinerja aset dan pengukuran efisiensi aset, agar semua ini dapat menjadi tolak ukur suatu penilaian yang objektif dalam suatu manajemen pengelolaan aset daerah yang bersih dan bertanggungjawab.

Kemudian terhadap unsur manajemen aset daerah dapat dilakukan melalui beberapa langkah antara lain :

1. Perencanaan aset daerah, dalam hal ini bagaimana suatu perencanaan terpadu dibuat oleh pemerintah daerah setempat yang dihubungkan dengan topik strategis pengembangan daerah yang akan dikembangkan melalui garis besar rencana pengembangan daerah (*Master Plan* pengembangan daerah), untuk menentukan bentuk perencanaan pembangunan aset daerah yang akan dilakukan.
2. Pelaksanaan aset daerah, dalam hubungan ini yaitu bagaimana aset daerah yang akan dibangun tersebut dikelola dalam bentuk manajerial yang

tersusun dengan baik dan dilakukan secara professional dan kompeten oleh suatu badan pengelolaan aset daerah yang sah dan bertanggungjawab.

3. Pengawasan aset daerah, yang dalam hubungan ini ditujukan untuk melihat bagaimana bentuk pertanggung jawaban aset daerah itu dilakukan meliputi : bentuk pelaporan keuangan aset daerah serta laporan kinerja aset daerah yang harus disampaikan manajemen aset daerah secara terjadwal dan transparan.

Kiranya dari adanya suatu sistem pengendalian aset daerah yang dijelaskan diatas dapat memberikan gambaran menyeluruh tentang bagaimana bentuk pengendalian yang baik terhadap pengelolaan suatu aset milik daerah yang ditujukan sepenuhnya untuk meningkatkan pendapatan asli di daerah tersebut.

#### **a. Pertanggungjawaban Aset Daerah**

Untuk menciptakan suatu sistem pengendalian aset daerah yang baik, maka sistem pertanggungjawaban aset daerah merupakan suatu alat pengendalian yang baik (Soemardjo Tjitrosidojo, 1977–90) yang menjelaskan bahwa akhir dari suatu proses manajemen yang baik wajib diikuti dengan bentuk pelaporan dan pertanggung jawaban yang terurai guna memberikan masukan kepada pihak-pihak yang berkepentingan untuk membuat keputusan yang berguna bagi organisasi tersebut. Berangkat dari maksud statemen diatas, maka sudah sepatutnya dalam suatu sistem pengelolaan aset daerah maka manajemen pengelolaan aset wajib memberikan pertanggungjawaban yang baik dan berkualitas bagi pemerintah daerah setempat guna dipakai sebagai bahan analisa dan pengambilan keputusan strategis demi meningkatkan pendapatan asli di daerah tersebut.

Bentuk-bentuk pertanggungjawaban ini dapat dilakukan menurut sistem pertanggung jawaban yang dilakukan (Sondang P.Siagian, 1995), berdasarkan:

1. Waktu Pelaporan/pertanggungjawaban, yang terdiri dari: Laporan Harian, Laporan Mingguan, Laporan Bulanan, Laporan Triwulan, Laporan Smesteran, dan Laporan Tahunan.
2. Bentuk pertanggungjawaban, yang terdiri dari: Laporan Keuangan, Laporan Aktifitas, Laporan Kinerja.

## b. Pengukuran Kinerja Aset Daerah

Untuk dapat mengetahui seberapa besar keberhasilan pengelolaan suatu manajemen aset daerah, maka perlu dibuat suatu bentuk prinsip-prinsip atau standart pengukuran terhadap keberhasilan pengelolaan aset daerah yang dilakukan oleh manajemen aset daerah yang ada. Bentuk pengukuran kinerja ini dapat merupakan suatu penilaian menyeluruh terhadap manajemen pengelolaan aset yang terdiri dari pengukuran rasio-rasio (Soemardjo Tjitrosidojo, 1975), yang antara lain:

1. Rasio Keuangan, yang terdiri dari: Rasio Likuiditas, Profitabilitas, Solvabilitas, Leverage dan hubungan antara rasio tersebut.
2. Rasio Kegiatan (aktifitas), yang terdiri dari: Analisa yang ditujukan untuk menilai tingginya efektifitas dan efisiensi penggunaan aset daerah serta seberapa manfaat yang diberikan aset tersebut selama periode tertentu.

Semua pengukuran rasio keuangan diatas, pada umumnya ditujukan untuk melihat hasil operasional manajemen aset daerah, oleh karena itu perlu juga dilihat suatu penilaian yang menyeluruh tentang proses pengelolaan manajemen (Soemardjo Tjitrosidojo,1975) terhadap aset daerah yang ada meliputi:

1. Tujuan dan Kebijakan manajemen: (menyangkut objektif dan *policy*), dimana faktor ini bersangkut paut dengan maksud dan tujuan dari perusahaan suatu kegiatan usaha, pedoman kerja yang digunakan dalam usaha.
2. Organisasi: Unsur ini berhubungan dengan faktor manajerial dan kompetensi organisasi serta wewenang dan tanggungjawabnya.
3. Hasil (*output*) yang dihasilkan.
4. Pasar: faktor ini berhubungan dengan pelanggan, tempat dan sifat serta intensitas kebutuhannya.
5. Program pelayanan langganan/konsumen: faktor ini sangat penting bagi suatu program pengelolaan aset daerah yang berwujud objek wisata daerah, seperti Wisata Bahari Lamongan dan Gua Maharani, di Kabupaten Lamongan.

6. Rencana Kerja manajemen: Faktor ini berhubungan dengan bagaimana manajemen aset daerah ini membuat suatu perencanaan strategis terhadap pengelolaan objek wisata daerah tersebut.
7. Program penelitian dan pengembangan (R dan D): Faktor ini berhubungan dengan bagaimana manajemen aset daerah ini merencanakan pengembangan usaha, baik pengembangan pelayanan, pengembangan sarana dan prasarana untuk lebih meningkatkan kegembiraan dan rasa aman pengunjung objek wisata daerah dimaksud.
8. Pembiayaan: Faktor ini berhubungan dengan bagaimana manajemen aset daerah ini memperoleh dan menggunakan secara optimal sumber-sumber keuangan yang diperlukan oleh usaha objek wisata ini, yang meliputi: Permodalan, Pembiayaan dan pengendaliannya.
9. Sistem Pengendalian: Faktor ini berhubungan dengan bagaimana suatu sistem pengawasan dan pengendalian itu dirancang oleh manajemen aset daerah ini dan dilakukan yang diarahkan untuk meningkatkan fungsi-fungsi manajemen pengelolaan aset daerah yang ada.

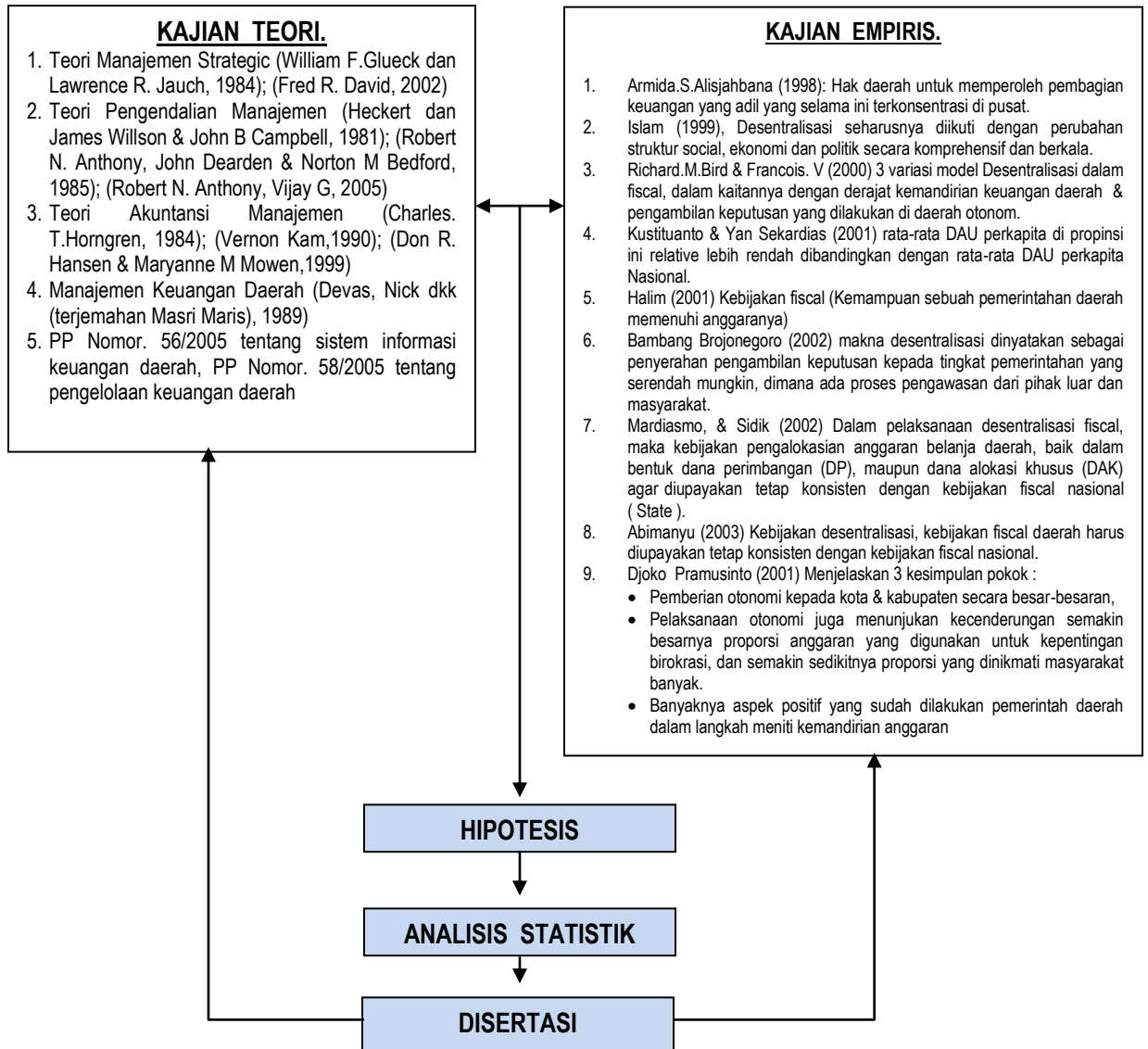


## KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS PENELITIAN

### Kerangka Proses Berpikir

Gambar 6

### Kerangka Proses Berpikir

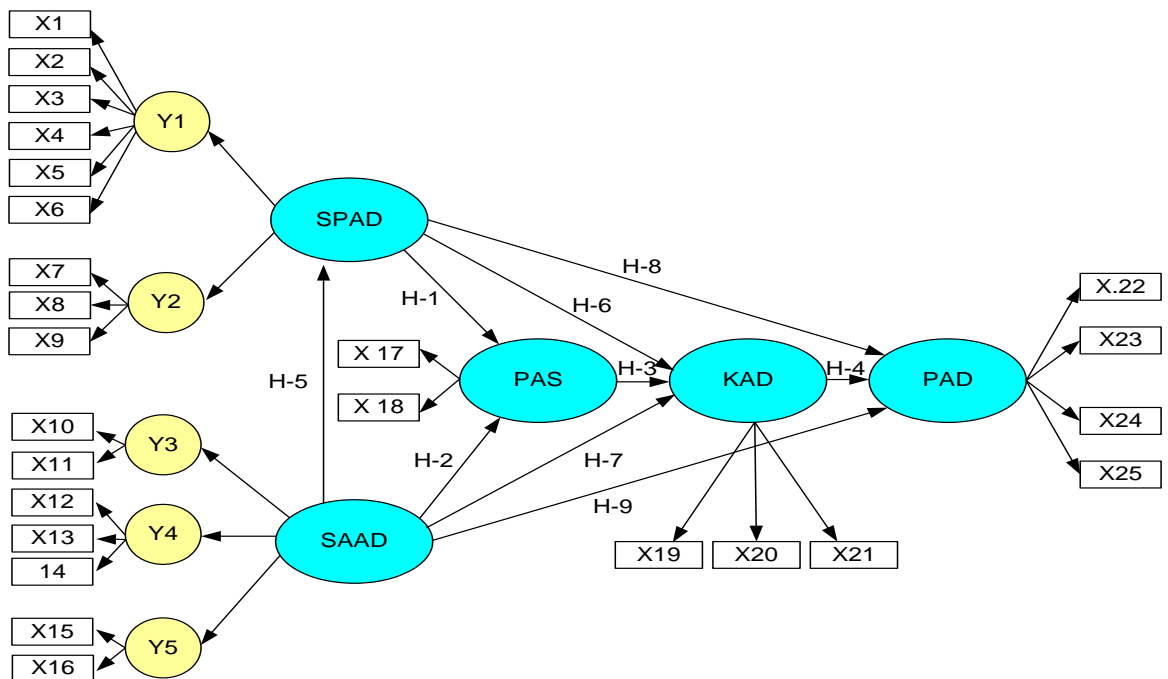


### Kerangka Model Analisis

Agar pembahasan konsep penelitian ini menjadi suatu bahan acuan yang lebih terperinci dan memudahkan proses kerja penelitian ini, maka secara teoritisasi konsep pemikiran teoritis dari rencana penelitian tersebut harus dapat dijabarkan dan digambarkan dalam suatu konsep berpikir analisis dalam suatu model, secara sistematis dan logis. Suatu metode berpikir sistematis, memiliki tata cara, tata urutan dan bentuk kegiatan yang jelas dan runtut.

Model analisa yang akan dibangun tersebut kiranya akan dapat memberikan gambaran menyeluruh terhadap rencana penelitian ini, mulai dari variabel penelitian dan juga indicator penelitian yang akan dipakai sampai dengan hubungan antar variabel serta bagaimana pembentukan kesimpulan penelitian. Oleh karena itu maka sesuai dengan judul penelitian ini: Analisis Manajemen Aset Daerah dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Lamongan, dengan sub judul: Study atas Aktiva Tetap Berwujud – Objek Wisata Daerah., maka peneliti ingin menjelaskan hubungan kasual penelitian ini dalam suatu model analisis penelitian sebagai berikut:

**Gambar 7**  
**Kerangka Konseptual**



## METODE PENELITIAN

### Populasi dan Sampel Penelitian

Berdasarkan rancangan penelitian diatas serta kebutuhan data serta informasi penelitian yang ada, maka populasi untuk penelitian ini adalah seluruh badan pengelolah aset daerah dibidang parawisata yang meliputi, dinas pemerintahan maupun badan swasta yang kerja sama dengan pemerintah Kabupaten Lamongan. Dengan demikian, maka populasi dan sample penelitian diatur sesuai dengan variabel penelitian yang ada pada wilayah penelitian, yang diatur sebagai berikut:

1. Populasi Penelitian: Adalah seluruh badan dan lembaga yang terkait dengan sistem pengelolaan aset daerah Kabupaten Lamongan yang mengelolah aset wisata, baik wisata alam maupun wisata budaya dan purbakala. Oleha karena itu ada beberapa badan atau lembaga serta dinas daerah yang terkait antara lain meliputi:
  - a) Dinas Parawisata dan Budaya.
  - b) Dinas Pendapatan Daerah.
  - c) Dinas terkait (SKPD) yang memiliki keterkaitan koordinasi dalam suatu kegiatan pengelolaan aset daerah.
  - d) Lembaga swasta dalam rangka kerja sama pengelolaan aset wisata daerah atau kemitraan.
  - e) Badan lain yang dibentuk pemerintah daerah untuk tugas parawisata dan peningkatan pendapatan aset daerah (Badan Keuangan dan Barang Daerah di Kabupaten Lamongan-BKBD).

Sebelum menetapkan besar sampel (banyaknya data yang disampel), maka besarnya populasi harus ditetapkan terlebih dahulu, yaitu kelompok yang nanti akan diteliti. Dan karena populasi penelitian ini berada dalam kabupaten lamongan, maka dinas dan badan yang telah disebut diatas akan dipakai sebagai populasi penelitian. Dengan demikian jumlah sample penelitian sama dengan jumlah populasi penelitian, hal ini agar fokus penelitian yang akan dikembangkan menjadi tertuju dan hanya difokuskan pada populasi yang ada. Karena populasi penelitian ini berada di wilayah

Kabupaten Lamongan, maka semua data penelitian yang diperlukan akan diambil pada sumber data primer pada badan atau lembaga yang mengelola aset daerah tersebut, baik data manajemen aset maupun data keuangan aset. Kemudian sekiranya manajemen pengelolaan aset daerah dimaksud berada diluar wilayah kabupaten lamongan yang disebabkan bentuk dan sistem pengelolaan aset daerah itu menunjuk demikiann, maka akan diusahakan untuk memasukan populasi tersebut dalam rancangan penelitian ini, hal ini agar diperoleh suatu representasi data yang benar dan dapat dipercaya.

2. Sampel Penelitian: Karena jumlah populasi penelitian adalah seluruh dinas terkait dan badan/lembaga yang ada di kabupaten lamongan yang berhubungan dengan pengelolaan aset daerah tersebut dan karena jumlah populasi penelitian yang terbatas hanya pada populasi diatas, maka sampel penelitian yang diambil juga adalah seluruh populasi yang ada, sesuai dengan badan dan lembaga yang sifat kerja dan tugasnya adalah melakukan pengendalian aset wisata daerah di objek penelitian, oleh karena itu populasi penelitian ini dibagi menurut sumber data penelitian yang telah ada pada beberapa dinas/departemen dalam pemerintahan Kabupaten Lamongan pada umumnya memiliki kewenangan mengelola aset daerah tersebut, antara lain:
  - a. Aset Objek wisata yang dikelola dengan pola kerjasama dengan pihak swasta, maka lembaga kerja sama tersebut yang merupakan sampel penelitian sebagai sumber data dan informasi.
  - b. Aset Objek wisata yang dikelola sendiri oleh pihak pemerintah daerah secara otonom, maka dinas terkait yang membawahnya seperti Dinas Pariwisata daerah yang merupakan sumber data serta informasi.
  - c. Dinas-dinas lain yang berada dalam lingkungan pemerintah daerah kabupaten Lamongan terutama dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) kabupaten Lamongan, yang antara lain memiliki data tentang jumlah penerimaan atau pendapatan dari hasil pengelolaan aset daerah wisata di kabupaten Lamongan.
  - d. Sekretariat daerah yang mengatur struktur manajemen pemerintahan daerah beserta parmanen *file* atas semua aset daerah tersebut, untuk melihat jumlah dan nilai aset daerah dimaksud beserta struktur kepemilikannya dan model pengelolaanya, apakah bentuk kerjasama atau pengelolaan mandiri oleh pemerintah daerah Lamongan.

- e. Badan Keuangan dan Barang Daerah (BKBD) kabupaten Lamongan yang memiliki tugas untuk mengawasi dan melakukan koordinasi dengan pihak kemitraan dalam pengelolaan aset daerah.

Selanjutnya untuk mengawasi semua *sampel* penelitian yang diambil dari populasi penelitian tersebut, maka pengawasan/*monitoring* atas data penelitian yang diambil dari objek penelitian di tabulasikan dalam suatu klasifikasi data sesuai dengan bentuk dan manfaat dari setiap data aset daerah yang ada, baik berupa nilai aset dan besarnya pendapatan aset tersebut.

Oleh karena jumlah populasi dan sampel penelitian ini terbatas pada beberapa dinas dan lembaga yang terkait dengan keparawisataan dan hanya pada suatu daerah yaitu di Kabupaten Lamongan, maka penentuan besar dan sampel dan populasi penelitian ini adalah seluruhnya dari dinas dan lembaga terkait tersebut atau sebesar 100% dari sumber informasi yang dibutuhkan dan data yang akan dipakai sebagai bahan kajian. Dengan demikian penentuan populasi dan *sampel* penelitian ini dapat dijelaskan dalam suatu tabel sebagai berikut:

**Tabel 2**

**Populasi dan Sampel Penelitian**

No	Jenis Data Penelitian	Populasi	Sampel
1	Objek Wisata Daerah : Wisata Bahari Lamongan (WBL) Resort Tanjung Kodok.	Dinas Pariwisata Dan Lembaga terkait Lembaga Kemitraan	Dinas Pariwisata Dan Lembaga terkait Lembaga Kemitraan
2	Wisata Religi : Sunan Drajat	-idem-	-idem-
3	Wisata Alam : Gua Maharani	-idem-	-idem-
4	Wisata Alam : Waduk Gondang	-idem-	-idem-
5	Data Keuangan Daerah:	Sekretariat Daerah. & Badan Swasta Kerja- Sama	Sekretariat Daerah. & Badan Swasta Kerja- Sama
6	Struktur Manajemen Aset Daerah :	-idem-	-idem-

Dari populasi dan sampel penelitian yang disajikan diatas, nampak bahwa semua data penelitian ini akan diperoleh pada semua badan pemerintah daerah yang ada di kabupaten lamongan yang terkait, dan diharapkan semua sumber data diatas dapat memberikan suatu kumpulan data yang representative untuk semua data yang diperlukan dalam penelitian ini.

### **Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel**

Berdasarkan rancangan penelitian serta populasi dan sample penelitian yang diuraikan diatas, maka variabel penelitian yang akan diteliti harus dapat diidentifikasi agar proses analisis dapat dilakukan dan memiliki makna dalam kesimpulan serta analisa atas hasil penelitian ini. Oleh karena itu definisi operasional penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Variabel Manajemen Pemberdayaan Aset Daerah yang merupakan Dependen Variabel (Variabel Indogen), dapat didefinisikan sebagai suatu lembaga daerah yang ditunjuk atau dibentuk oleh daerah tersebut sebagai suatu badan yang memiliki otoritas dalam mengelolah aset wisata daerah yang berada di Kabupaten Lamongan. Dalam kegiatan manajemen pemerintahan daerah ditugaskan untuk mengendalikan aset daerah tersebut.

Hubungan variabel ini adalah dengan 2 (dua) variabel lain yaitu:

- a) Sistem Pengendalian Aset Daerah, sebagai variabel indogen: Yaitu menunjukkan suatu bentuk sistem atau prosedur kerja atau mekanisme kerja yang ada dan dilakukan pada suatu dinas pariwisata daerah atau lembaga lain yang ditunjuk untuk mengelolah aset daerah di kabupaten lamongan.
  - b) Sistem Akuntansi Aset Daerah, sebagai variabel eksogen: Yaitu menunjukkan suatu sistem informasi serta sistem pencatatan atas semua data aset daerah dalam suatu bentuk akuntansi yang tertata dengan baik serta dapat memberikan informasi yang akurat terhadap aset daerah dimaksud, baik informasi nilai aset, maupun informasi pendapatanya, dalam laporan akuntansi yang sesuai dengan prinsip akuntansi pemerintahan daerah.
2. Variabel Sistem Pengendalian Aset Daerah. yang merupakan variabel independen, dapat didefinisikan sebagai suatu bentuk kegiatan manajemen

dalam sistem kerja pengendalian aset daerah di kabupaten lamongan, dengan indikator yang ada dalam variabel ini adalah:

- a) Sistem Informasi manajemen. Yaitu suatu bentuk jejaring informasi dalam kegiatan manajemen aset daerah yang dibentuk pada badan pengelola aset daerah dimaksud dalam penelitian ini.
  - b) Efektivitas. Yaitu suatu bentuk pengukuran atau standart kerja manajemen pengendalian aset daerah yang ditentukan sebagai dasar penilaian tingkat pemanfaatan aset daerah secara terus menerus.
3. Variabel Sistem Akuntansi Aset Daerah. Yaitu merupakan variabel *independent* (Variabel eksogen) dan dapat didefinisikan sebagai suatu sistem dan prosedur akuntansi yang telah ditetapkan dalam standart tertentu baik pemerintah maupun standart berdasarkan teori akuntansi yang berlaku umum, serta menunjukkan cara dan prosedur bagaimana suatu akuntansi atas aset daerah itu dilakukan, meliputi cara pencatatan dan prinsip2 pencatatan serta pelaporannya. Dengan indikator yang ada dalam variabel ini antara lain :
- a) Sistem Informasi Akuntansi. Yaitu suatu bentuk standart jejaring informasi dan kerja dari prosedur akuntansi yang membentuk suatu sistem informasi atas kejadian akuntansi pada badan atau lembaga yang mengelola aset daerah tersebut.
  - b) Pencatatan. Yaitu suatu pekerjaan dalam mengelola sistem dan prosedur akuntansi kedalam media akuntansi yang dipersyaratkan.
  - c) Pelaporan. Yaitu suatu bentuk atau standart laporan baik menyangkut: bentuk laporan, jumlah laporan, serta jadwal dan periode laporan.
4. Variabel Kinerja Aset Daerah. Yaitu merupakan suatu variabel Moderasi/moderator, adalah suatu variabel independent (Variabel indogen) lainnya yang mempunyai efek kontingensi dari hubungan variabel dependen, manajemen pemberdayaan aset daerah dan variabel independen pendapatan asli daerah.

Variabel ini memiliki 3 (tiga) indikator sebagai alat untuk mengukur kinerja aset daerah tersebut, dari hasil hubungan variabel dependen manajemen pemberdayaan aset daerah dengan variabel independent

Pendapatan asli daerah (PAD) yang merupakan variabel control, antara lain:

- a) Rasio Nilai aset daerah, yaitu suatu nilai rasio yang dihitung dari: perbandingan suatu nilai kelompok aset daerah tertentu terhadap total nilai aset daerah dalam suatu kurun waktu tertentu ( NKAD/TNAD).
  - b) Rasio Pendapatan kelompok Aset daerah, yaitu suatu nilai rasio yang dihitung dari: perbandingan Pendapatan kelompok aset daerah tertentu terhadap total pendapatan aset dari daerah tersebut dalam suatu kurun waktu tertentu ( PKAD/TPAD).
  - c) Rasio Pendapatan tiap aset daerah, yaitu suatu nilai rasio yang dihitung dari: besarnya satuan pendapatan setiap aset daerah dibandingkan dengan total pendapatan aset daerah tersebut dalam suatu kurun waktu tertentu. (PAD/TPAD).
5. Variabel Pendapatan Asli Daerah. Yaitu suatu variabel independent (yang merupakan variabel kontrol), yang dapat didefinisikan sebagai suatu jumlah penerimaan asli daerah atas hasil pengelolaan aset daerah tertentu secara mandiri dalam jangka waktu tertentu. Variabel ini hanya menggambarkan besarnya penerimaan PAD dari kelompok penerimaan aset/kekayaan daerah yang merupakan sumber pendapatan asli daerah (PAD) saja.

Dengan demikian jumlah penerimaan pendapatan asli daerah dari sumber lain, seperti Pajak daerah dan Retribusi daerah yang selama ini merupakan komponen pendapatan asli daerah (didalam sistem perhitungan keuangan pendapatan daerah), ditiadakan dalam variabel ini.

### **Metode dan Instrumen Penelitian**

Seperti diuraikan bahwa populasi dan sampel penelitian ini meliputi semua dinas dan badan atau lembaga daerah yang ditunjuk untuk mengendalikan dan mengelola aset daerah di kabupaten Lamongan, oleh karena itu maka data yang telah dikumpulkan dari sumber penelitian yang ada akan ditabulasikan dalam suatu tabulasi data, dengan demikian maka semua data tentang variabel penelitian serta indikatornya akan dijelaskan dengan bobot data absolut, berupa angka-angka pencapaian hasil pengelolaan aset daerah tersebut. Data yang telah terkumpul antara lain:



1. Jumlah aset daerah, yang masuk dalam katagori: Objek Wisata di Kabupaten Lamongan, baik wisata alam yang terbentuk dari alam sendiri (misalnya: Gua dan sejenisnya), maupun objek wisata yang dieksploitasi oleh manusia dengan keputusan pemerintah daerah yang dicatat pada Dinas Pariwisata daerah di kabupaten Lamongan dalam kerja sama/kemitraan dengan pihak swasta masional (WBL, Tanjung Kodok Resort, dan lainnya).
2. Sistem Manajemen Aset Daerah. Yang dimaksud dalam katagori ini adalah bagaimana manajemen aset daerah itu diatur oleh daerah. Apakah dengan pola kerja sama dengan pihak swasta atau dikerjakan dan dimanage sendiri oleh pemerintah daerah setempat.
3. Jumlah pendapatan aset daerah, yang diperoleh dari tiap objek wisata, maupun jumlah secara keseluruhan objek wisata, yang masuk dalam pendapatan daerah yang dicatat pada Dinas Pendapatan daerah Kabupaten Lamongan.
4. Hasil kuantifikasi data atas data kualitatif, yang berupa:
  - a. Skoring data Sistem Pengendalian Manajemen aset daerah.
  - b. Skoring data akuntansi aset daerah.
  - c. Skoring data kinerja manajemen aset daerah.
  - d. Skoring data Manajemen Pemberdayaan aset daerah.
  - e. Hasil Pengukuran Rasio-Rasio Kinerja aset daerah dan pendapatan asli daerah (PAD).

Hasil kuantifikasi data yang terkumpul diperoleh dari daftar kuisisioner yang dilakukan dengan menggunakan pengukuran *Skala Likert* yang telah disiapkan dalam daftar kuisisioner.

Atas semua data hasil penelitian ini, maka selanjutnya akan dilakukan pengolahan data dan analisis data dengan metode *Struktural Equation Modelling* (SEM) dan selanjutnya alat uji yang dipakai adalah PLS, oleh karena itu mendahului analisis data ini, maka sebelumnya akan dilakukan suatu proses pengukuran validasi dan reliabilitas data yang dilakukan terlebih dahulu melalui pengujian data dan analisis, karena metode diatas adalah salah satu

metode analisis yang berkaitan dengan *model structural* dan analisis jalur yang juga dapat digunakan untuk pemeriksaan validasi dan reliabilitas instrument penelitian yang pada umumnya berupa kuesioner dengan menggunakan pendekatan analisis faktor konfirmatori.

Dalam hal pengukuran tingkat validitas dan reliabilitas data yang dimasukan, maka ditunjukan untuk mengukur validitas dan reliabilitas dari variabel dan indikator yang dipakai dalam penelitian ini, dengan demikian diharapkan adanya suatu hasil analisa yang dapat memberikan gambaran yang benar, sehingga memberikan suatu hasil yang berguna serta dapat dipakai sebagai dasar yang kuat untuk pengambilan keputusan dan kebijakan dari Pemerintah Kabupaten Lamongan dalam mengelolah aset daerah.

Atas semua instrumen penelitian yang disajikan diatas, maka atas objek penelitian yang akan dilakukan pada semua dinas terkait serta lembaga atau badan pengelolaan aset daerah yang ada di Kabupaten Lamongan, maka demi untuk memperoleh suatu data yang valid serta dapat dipercaya, maka teknik pengumpulan data yang dipergunakan adalah:

1. Teknik langsung: yaitu suatu teknik pengumpulan data dengan wawancara dan penyebaran kuisisioner secara langsung pada suku dinas terkait, serta pada level manajemen yang berada pada dinas tersebut secara serempak, agar diperoleh data yang bersifat primer dari wilayah penelitian
2. Teknik tidak Langsung: yaitu suatu teknik pengumpulan data dengan cara mengumpulkan data sekunder pada dinas terkait, baik yang berhubungan dengan unsure-unsur keuangan, maupun yang berhubungan dengan unsure-unsur kepemilikan aset suatu daerah yang berada pada wilayah penelitian di Kabupaten Lamongan.

### **Teknik Analisis Data**

Disamping data sekunder dari sumber data sesuai dengan populasi dan sampel penelitian diatas, maka data primer atas hasil infentarisasi data melalui wawancara langsung akan diolah dalam suatu tabulasi data wawancara untuk kebutuhan tiap variabel dan indikator penelitian yang ada. Kemudian atas semua hasil analisis data penelitian yang telah terkumpul, maka selanjutnya akan dilakukan suatu proses identifikasi data dari hasil penelitian yang dilakukan dengan menggunakan model analisis yang telah digambarkan pada BAB III di atas, yang mana hasil identifikasi data tersebut akan menghasilkan

suatu struktur data yang disusun sesuai dengan bobot untuk setiap variabel maupun indicator diatas, oleh karena itu maka akan tersusun data sebagai berikut:

1. Bagaimana peranan manajemen pemberdayaan aset daerah terhadap kinerja aset daerah, yang disusun dan dianalisa atas data dari variabel penelitian yang mendukungnya yaitu: variabel akuntansi aset daerah dan variabel sistem pengendalian aset daerah. Besaran nilai analisis ini dijabarkan dalam bentuk analisa kualitatif yang bersifat kesimpulan-kesimpulan untuk membantu memecahkan hipotesis penelitian ini.
2. Bagaimana peranan kinerja aset daerah dalam pendapatan asli daerah, yang disusun dan dianalisa atas dasar pengukuran kinerja aset daerah yang ditentukan diatas.
3. Bagaimana variabel sistem pengendalian aset daerah itu dipengaruhi oleh indikator sistem informasi manajemen dan efektifitas pengendalian aset daerah yang ada.
4. Bagaimana variabel akuntansi aset daerah itu dipengaruhi oleh indikator sistem informasi akuntansi, indikator pencatatan akuntansi dan indikator pelaporan akuntansi aset daerah.

### **Analisis Model *Partial Least Square (PLS)***

Partial Least Square merupakan metode analisis yang dikembangkan sebagai alternatif untuk situasi dimana teorinya lemah dan atau indikator yang tersedia tidak memenuhi model pengukuran refleksif, tetapi formatif. PLS sebagai “*soft modeling*” merupakan metode analisis yang powerful karena dapat diterapkan pada semua skala data, dan tidak membutuhkan banyak asumsi dan ukuran sample tidak harus besar. PLS selain dapat digunakan sebagai konfirmasi teori juga dapat digunakan untuk membangun hubungan yang belum ada landasan teorinya atau untuk pengujian proposisi. (Solimun, 2006: 57)

Dibandingkan dengan pendekatan *Structural Equation Modeling (SEM)* yang sudah banyak digunakan, *Partial Least Square (PLS)* mampu menghindari dua masalah serius, yaitu :

- (a) Solusi yang tidak dapat diterima (*inadmissible solution*); hal ini terjadi karena *Partial Least Square* (PLS) berbasis varians dan bukan kovarians, sehingga masalah matriks singularity tidak akan pernah terjadi. Disamping itu, *Partial Least Square* (PLS) bekerja pada model struktural yang bersifat rekursif, sehingga masalah *un-identified*, *under-identified* atau *over-identified* juga tidak akan terjadi.
- (b) Faktor yang tidak dapat ditentukan (*factor indeterminacy*), yaitu adanya lebih dari satu faktor yang terdapat dalam sekumpulan indikator sebuah variabel. Khusus indikator yang bersifat formatif tidak memerlukan adanya *common factor* sehingga selalu akan diperoleh variabel laten yang bersifat komposit. Dalam hal ini variabel laten merupakan kombinasi linier dari indikator-indikatornya.

*Partial Least Square* (PLS) merupakan pendekatan yang lebih tepat untuk tujuan prediksi, hal ini terutama pada kondisi dimana indikator bersifat formatif. Dengan variabel laten berupa kombinasi linier dari indikatornya, maka prediksi terhadap variabel laten dapat dengan mudah diperoleh, sehingga prediksi terhadap variabel laten yang dipengaruhinya juga dapat dengan mudah dilakukan. Melalui pendekatan ini, diasumsikan bahwa semua varian yang dihitung merupakan varian yang berguna untuk penjelasan. Oleh karena pendekatan untuk mengestimasi variabel laten dianggap kombinasi linier dari indikator, maka menghindarkan masalah *indeterminacy* dan menghasilkan skor komponen yang tepat. Dengan menggunakan algoritma iterative yang terdiri dari beberapa analisis dengan metode kuadrat terkecil biasa (*ordinary least square*) maka persoalan identifikasi tidak menjadi masalah, karena model bersifat rekursif. *Partial Least Square* (PLS) memberikan model umum yang meliputi teknik korelasi kanonikal, *redundancy analysis*, regresi berganda, *Multivariate Analysis Of Variance* (MANOVA) dan *principle component Analysis*.

Pendekatan *Partial Least Square* (PLS) didasarkan pada pergeseran analisis dari pengukuran estimasi parameter model kepada pengukuran prediksi yang relevan. Sehingga fokus analisis bergeser dari hanya estimasi dan penafsiran signifikansi parameter menjadi validitas dan akurasi prediksi. Dasar yang digunakan adalah *resampling* yang dikembangkan oleh Geisser & Stone sehingga ukuran sampel dalam *Partial Least Square* (PLS) boleh kecil, dengan perkiraan sebagai berikut:

- 1) Sepuluh kali skala dengan jumlah indikator formatif terbesar (mengabaikan indikator refleksif).
- 2) Sepuluh kali lipat jumlah jalur struktural (*structural path*) yang mengarah pada konstruk tertentu dalam model struktural.

Di dalam *Partial Least Square* (PLS) variabel laten bisa berupa hasil pencerminan indikatornya, diistilahkan dengan indikator refleksif atau bisa juga konstruk dibentuk oleh indikatornya, diistilahkan dengan indikator formatif. Perbedaannya antara indikaor refleksif dengan indikator formatif ditunjukkan pada Tabel dibawah ini :

**Tabel. 3**

**Perbedaan Indikator Refleksif dan Formatif**

Indikator Refleksif	Indikator Formatif
1. Arah hubungan kausalitas seolah-olah dari konstruk ke indikator	1. Arah hubungan kausalitas seolah-olah dari indikator ke konstruk
2. Antar indikator diharapkan saling berkorelasi (memiliki <i>internal consistency reliability</i> )	2. Antar indikator diasumsikan tidak berkorelasi (tidak dipengaruhi uji konsistensi internal atau <i>alpha cornbach</i> )
3. Menghilangkan satu indikator dari model pengukuran tidak akan merubah makna dan arti konstruk	3. Menghilangkan satu indikator berakibat merubah makna dari konstruk
4. Menghitung adanya kesalahan pengukuran (error) pada tingkat indikator.	4. Kesalahan pengukuran diletakkan pada tingkat konstruk (zeta)

Model refleksif memandang (secara matematis) indikator seolah-olah sebagai variabel yang dipengaruhi oleh variabel laten. Sehingga indikator-indikator sebuah variabel laten seolah-olah dipengaruhi oleh faktor (variabel laten) yang sama, hal ini mengakibatkan bila terjadi perubahan dari satu indikator akan berakibat pada perubahan pada indikator lainnya dengan arah yang sama. Model refleksif **mengasumsikan** semua indikator seolah-olah dipengaruhi oleh variabel konstruk, oleh karena itu menghendaki antar indikator saling berkorelasi satu sama lain. Dalam hal ini konstruk diperoleh

menggunakan analisis faktor. Model indikator refleksif dikembangkan berdasarkan pada *classical test theory* yang mengasumsikan bahwa variasi skor pengukuran konstruk merupakan fungsi dari *true score* ditambah *error*. Jadi konstruk laten seolah-olah mempengaruhi variasi pengukuran dan asumsi hubungan kausalitas dari konstruk ke indikator. Model refleksif sering disebut *principal factor model* dimana kovarian pengukuran indikator seolah-olah dipengaruhi oleh konstruk laten atau mencerminkan variasi dari konstruk laten.

Model formatif memandang (secara matematis) indikator seolah-olah sebagai variabel yang mempengaruhi variabel laten, dalam hal ini memang berbeda dengan model analisis faktor, jika salah satu indikator meningkat, tidak harus diikuti oleh peningkatan indikator lainnya dalam satu konstruk, tapi jelas akan meningkatkan variabel latennya. Model formatif (konstruk diperoleh melalui analisis komponen utama) tidak mengasumsikan perlunya korelasi antar indikator, atau secara konsisten **berasumsi** tidak ada hubungan antar indikator. Oleh karena itu, internal konsistensi (*alpha Cronbach*) kadang-kadang tidak diperlukan untuk menguji realibilitas konstruk formatif. Dalam model formatif diasumsikan bahwa semua indikator mempengaruhi *single* konstruk sehingga arah hubungan kausalitas seolah-olah mengalir dari indikator ke konstruk laten dan indikator sebagai group secara bersama-sama menentukan konsep, konstruk atau laten, maka ada kemungkinan antar indikator saling berkorelasi . Karena telah diasumsikan bahwa antar indikator tidak saling berkorelasi maka ukuran internal konsistensi realibilitas (*alpha cornbach*) tidak diperlukan untuk menguji realibilitas konstruk formatif. Kausalitas hubungan antar indikator tidak menjadi rendah nilai validitasnya hanya karena memiliki internal konsistensi yang rendah. Untuk menilai validitas konstruk perlu dilihat variabel lain yang mempengaruhi konstruk laten. Jadi untuk menguji validitas darikonstruk laten, peneliti harus menekankan pada *nimological* dan atau *criterion-related validity* .

### **Tempat dan Waktu Penelitian**

- a. Tempat penelitian adalah pada wilayah kabupaten Lamongan yang berada dalam koridor daerah Gerbangkertosusila, serta mengingat semua aset daerah pemerintah kabupaten Lamongan yang menjadi objek penelitian ini adalah berupa: Objek wisata yang berada di wilayah ini, maka penelitian ini hanya akan dilakukan dalam kegiatan dari beberapa dinas terkait atau lembaga daerah yang ada disekitar kabupaten lamongan yang tugas dan tanggung jawab yang dilakukan adalah berhubungan dengan pengelolaan aset wisata tersebut, baik yang dikelola sendiri oleh daerah (Dinas

Pariwisata) maupun yang dikelola dengan kerjasama pihak swasta lainnya (Badan otoritas sendiri).

- b. Waktu Penelitian dilakukan dari bulan Januari sampai dengan bulan Juni 2008, dengan asumsi waktu akan dapat berubah sesuai dengan luasnya penelitian ini serta banyaknya data yang akan dikumpulkan dilapangan. Dan semua waktu yang dibutuhkan dalam penelitian ini, disesuaikan dengan kondisi dan situasi dilapangan nantinya.

## HASIL PENELITIAN

### Hasil Analisis Deskriptif

Dari hasil kuisioner yang dilakukan pada objek penelitian dengan total responden sesuai dengan jumlah populasi yang ada, maka hasil kuisioner nampak sebagai berikut :

**Tabel. 4**

**Distribusi Hasil Kuisioner Sistim Pengendalian Aset Daerah  
Sistim Informasi Manajemen Aset Daerah**

No.	Variabel / Sub Variabel	Score
1	Inisiatif Pelaporan Kerja	4.135
2	Bertanggung jawab dengan analisa yang mendukung	3.676
3	Memberikan informasi yang berkualitas.	3.582
4	Mempergunakan alat analisa	4.000
5	Memiliki sudut pandang <i>Going Concern</i>	3,946
6	Memberikan Rekomendas	3,973
	<b>Rerata</b>	<b>3,885</b>

Sumber : Hasil Olahan Data Penulis.

Hasil kuisioner diatas memberikan gambaran bahwa sistim informasi aset daerah dari objek penelitian ini telah berjalan dengan baik, hanya ada beberapa hal saja dalam suatu sistim pengendalian aset daerah pada objek penelitian ini masih diperlukan adanya perbaikan pada beberapa pola pengendalian, antara lain diperlukan ketegasan manajemen pemerintah daerah akan sistim informasi manajemen aset daerah yang lebih pada unsur : Rekomendasi, kualitas informasi dan analisa laporan yang mendukung. Akan tetapi secara rata-rata semua variabel diatas telah dapat dikendalikan dalam suatu sistim pengendalian manajemen aset daerah yang baik (score : 3,885)

**Tabel. 5**

**Distribusi Hasil Kuisioner Sistim Pengendalian Aset Daerah  
Efektifitas Pengendalian Manajemen Aset Daerah**

<b>No.</b>	<b>Variabel/ Sub Variabel</b>	<b>Score</b>
1	Ketepatan waktu laporan manajemen aset daerah.	3,986
2	Jadwal pengawasan berkala atas aset daerah	4,135
3	Mempergunakan alat analisa dalam laporan manajemen Aset daerah yang ada.	3,595
	<b>Rerata</b>	<b>3,905</b>

Sumber : Hasil Olahan Data Penulis.

Dalam pengendalian manajemen aset daerah, maka ukuran efektifitas pengendalian manajemen tergantung pada variabel yang digambarkan diatas, menunjukkan bahwa umumnya pengendalian yang dijalankan telah memiliki pengaruh yang baik dalam sistimpengendalian manajemen aset daerah pada objek penelitian (Score rata-rata : 3,905)



**Tabel. 6**

**Distribusi Hasil Kuisioner Sistim Akuntansi Aset Daerah  
Sistim Informasi Akuntansi Aset Daerah**

<b>No</b>	<b>Variabel/Sub Variabel</b>	<b>Score</b>
1	Sistim Akuntansi atas Aset Daerah	3.527
2	Patuh sistim Akuntansi Aset daerah	3.568
	<b>Rerata</b>	<b>3,548</b>

Sumber : Hasil Olahan Data Penulis.

Hasil kuisioner diatas menunjukkan bahwa informasi akuntansi atas aset daerah telah memiliki sistim informasi akuntansi aset daerah yang baik dan dilakukan dalam suatu sistim yang dapat dikendalikan dan telah dijalankan pada objek penelitian ini.

**Tabel. 7**

**Distribusi Hasil Kuisioner Sistim Akuntansi Aset Daerah  
Sistim Pencatatan Akuntansi Aset Daerah**

<b>No</b>	<b>Variabel/Sub Variabel</b>	<b>Score</b>
1	Bentuk sistim pencatatan transaksi akuntansi asset daerah	3.703
2	Data pencatatan akuntansi dan hasil catatan aset daerah	3,757
3	Intensitas kesalahan atas pencatatan akuntansi aset daerah	3,081
	<b>Rerata</b>	<b>3,514</b>

Sumber : Hasil Olahan Data Penulis.

Hasil kuisioner diatas memberikan gambaran bahwa dalam melakukan akuntansi atas aset daerah pada objek penelitian ini, menunjukkan bahwa semua aset daerah yang ada telah dicatat dan dilakukan sesuai dengan sistim pencatatan akuntansi aset daerah yang baik (score rata-rata. 3,514)

Kondisi ini memberikan gambaran yang kuat bahwa pada objek penelitian ini, sistim informasi akuntansi aset daerah telah berjalan dengan sebagaimana mestinya.

**Tabel. 8**

**Distribusi Hasil Kuisioner Sistim Akuntansi Aset Daerah  
Sistim Pelaporan Akuntansi Aset Daera**

<b>No</b>	<b>Variabel/Sub Variabel</b>	<b>Score</b>
1	Pelaporan untuk pemanfaatan aset daerah	3,865
2	Kegagalan dalam memberikan laporan aset daerah	2,662
	<b>Rerata</b>	<b>3,264</b>

Sumber : Hasil Olahan Data Penulis.

Hasil kuisioner diatas memberikan gambaran bahwa sistim pelaporan aset daerah dalam suatu mekanisme sistim akuntansi aset daerah pada objek penelitian ini, telah dilakukan dengan baik, sehingga kegagalan dalam memberikan laporan aset daerah cukup rendah. Dengan demikian menunjukkan bahwa perhatian manajemen pemerintah daerah di Lamongan terhadap pengelolaan aset daerah telah dapat dikatakan menunjukkan hasil yang cukup signifikan.

**Tabel. 9**  
**Pemberdayaan Aset Daerah**

No	Variabel/Sub Variabel	Score
1	Peraturan dan Pemnafaatan aset Daerah	3,541
2	Wewenang pengendalian manajemen aset daerah	3,595
	<b>Rerata</b>	<b>3,568</b>

Sumber : Hasil Olahan Data Penulis.

Hasil kuisisioner diatas memberikan gambaran bahwa proses pemberdayaan aset daerah pada objek penelitian ini memberikan suatu proses pemberdayaan aset daerah yang baik, karena didukung oleh peraturan dan wewenang pengendalian aset daerah yang terkontrol dalam sistim pemberdayaan aset daerah yang baik pula.

Pembangunan ekonomi di Kabupaten Lamongan telah memberikan suatu peningkatan ekonomi secara signifikan kepada masyarakat Lamongan dalam beberapa tahun terakhir. Semua ini dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten Lamongan dengan suatu konsep pemberdayaan ekonomi yang bersumber dari Pengembangan Ekonomi Lokal (PEL) yaitu dengan adanya usaha optimalisasi aset daerah lewat kerja sama deng an pihak swasta nasional. Karena daerah kabupaten Lamongan merupakan bagian dari daerah propinsi Jawa Timur, maka sudah barang tentu semua upaya diatas tidak terlepas dari adanya suatu koordinasi kerja yang kuat antara pemerintah daerah lamongan dengan pemerintah Propinsi Jawa Timur, hal diatas karena suatu tuntutan dari proses otonomi yang diberikan kepada daerah kabupaten dan kota di Indonesia.

### **Pengujian *Partial Least Square* (PLS)**

Pengujian model struktural Analisis Manajemen Aset Daerah untuk melihat pengaruh langsung dan tidak langsung terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah seperti.

Langkah permodelan struktural berbasis PLS dengan software Smart PLS adalah : spesifikasi model, model analisis jalur semua variabel laten dalam PLS terdiri dari tiga set hubungan yaitu (1) *outer model* yang menspesifikasi hubungan antara variabel laten dengan indikator atau variabel manifestnya (*measurement model*), (2) *inner model* yang menspesifikasi hubungan antar variabel laten (*structural model*), dan (3) *Weight relation* yaitu nilai kasus variabel laten dapat diestimasi.

#### **a. Evaluasi Outer Model**

*Convergent validity* dari measurement model dengan indikator refleksif dapat dilihat dari nilai korelasi antara score item/indikator dengan skore konstruknya. Indikator dianggap memenuhi syarat jika memiliki nilai korelasi diatas 0,7. namun demikian pada riset tahap pengembangan skala, loading 0,5 sampai dengan 0,6 masih dapat diterima. Pengujian atas instrument penelitian ini dilakukan dengan menguji indikator penelitian yang ada dengan membatasi loading faktornya (*sample estimate*) diatas 0,5 terhadap semua indikator yang ada dalam setiap variabel penelitian. Hal ini dilakukan agar indikator yang tidak signifikan supaya dapat dikeluarkan dari model analisis penelitian, sehingga semua indikator yang akan diteliti menjadi valid untuk dilanjutkan dalam penelitian ini. Setelah dilakukan estimasi dan menghasilkan beberapa loading factor yang kurang memenuhi syarat, maka hasil akhir dari loading factor yang dilakukan adalah seperti tabel berikut:

Tabel 10 : *Loading Factor*

	<b>original sample estimate</b>	<b>mean of subsamples</b>	<b>Standard deviation</b>	<b>T- Statistic</b>
<b>Y1</b>				
<b>X1</b>	0.681	0.668	0.083	8.182
<b>X2</b>	0.917	0.921	0.017	54.792
<b>X3</b>	0.756	0.772	0.051	14.961
<b>X4</b>	0.799	0.800	0.053	15.163
<b>X5</b>	0.846	0.847	0.041	20.820
<b>X6</b>	0.594	0.597	0.095	6.273
<b>X9</b>	0.668	0.655	0.088	7.624
<b>Y2</b>				
<b>X11</b>	0.822	0.818	0.056	14.604
<b>X12</b>	0.776	0.781	0.074	10.499
<b>X13</b>	0.690	0.682	0.088	7.869
<b>X14</b>	0.671	0.667	0.089	7.562
<b>X15</b>	0.905	0.904	0.026	34.767
<b>X16</b>	0.652	0.645	0.119	5.470
<b>Y3</b>				
<b>X17</b>	0.855	0.852	0.047	17.997
<b>X18</b>	0.948	0.947	0.016	60.185
<b>X19</b>	0.919	0.916	0.027	34.337
<b>Y4</b>				
<b>X20</b>	0.854	0.828	0.119	7.163
<b>X21</b>	0.966	0.952	0.129	7.489
<b>Y5</b>				
<b>X23</b>	1000	1000	0.000	
<b>SAAD</b>				
<b>X29</b>	1000	1000	0.000	
<b>SPAD</b>				
<b>X28</b>	1000	1000	0.000	
<b>PAS</b>				
<b>X26</b>	0.925	0.921	0.039	23.624

<b>X27</b>	0.918	0.926	0.042	22.022
<b>KAD</b>				
<b>X31</b>	0.975	0.957	0.156	6.254
<b>X32</b>	0.984	0.987	0.007	134.605
<b>PAD</b>				
<b>X34</b>	1000	1000	0.000	

Dari tabel diatas telah memenuhi persyaratan bahwa loading factor pada nilai original simple estimate sudah tidak ada yang dibawah nilai 0,5. Langkah berikutnya adalah dengan melihat nilai *composite reliability*, dimana persyaratan untuk memperoleh nilai composite reliability yang baik harus memiliki nilai diatas 0,7. setelah dilakukan estimasi maka didaapat hasil sebagai berikut:

**Tabel 11 : Composite Reliability**

	<b>Composite Reliability</b>
<b>Y1</b>	0.903
<b>Y2</b>	0.889
<b>Y3</b>	0.933
<b>Y4</b>	0.907
<b>Y5</b>	1.000
<b>SAAD</b>	1.000
<b>SPAD</b>	1.000
<b>PAS</b>	0.918
<b>KAD</b>	0.979
<b>PAD</b>	1.000

### b. Evaluasi Inner Model

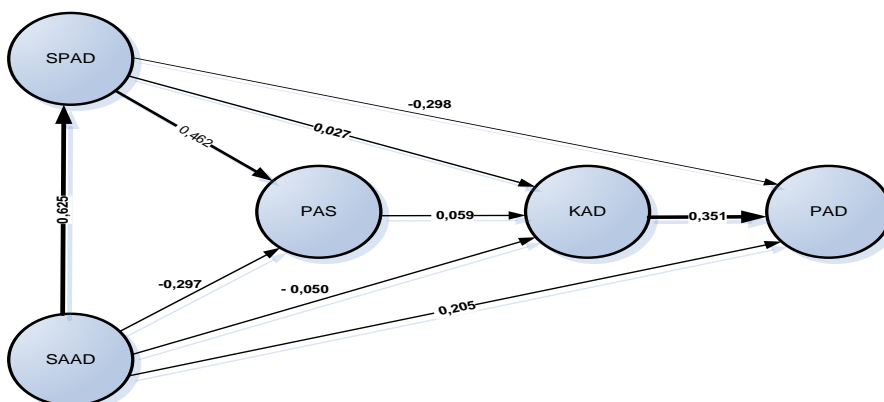
Inner model menilai hubungan antar konstruk laten dalam model yaitu dengan melihat koefisien jalur atau path structural, dari hasil penghitungan diperoleh nilai sebagai berikut:

**Tabel 12 : Results For Inner Weights**

	original sample estimate	mean of subsamples	Standard deviation	T-Statistic	p-value	keterangan
<b>SAAD -&gt; SPAD</b>	0,625	0,612	0,104	6,009	0,0000	Signifikan
<b>SAAD -&gt; PAS</b>	-0,297	-0,309	0,165	1,823	0,0689	Tidak Signifikan
<b>SPAD -&gt; PAS</b>	0,462	0,475	0,182	2,543	0,0113	Signifikan
<b>SAAD -&gt; KAD</b>	-0,050	-0,045	0,122	0,408	0,6834	Tidak Signifikan
<b>SPAD -&gt; KAD</b>	0,027	0,014	0,127	0,209	0,8345	Tidak Signifikan
<b>PAS -&gt; KAD</b>	0,059	0,044	0,132	0,447	0,6551	Tidak Signifikan
<b>SAAD -&gt; PAD</b>	0,205	0,208	0,213	0,964	0,3355	Tidak Signifikan
<b>SPAD -&gt; PAD</b>	-0,298	-0,31	0,163	1,833	0,0674	Tidak Signifikan
<b>KAD -&gt; PAD</b>	-0,351	-0,353	0,077	4,564	0,0000	Signifikan

Gambar 8

**Hasil Penghitungan Model Structural Manajemen Aset Daerah  
Terhadap Peningkatan Pendapatan Aset Daerah**



Dari tabel dan gambar diatas dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Hasil uji hipotesis 1 (H-1) Sistem Pengendalian Aset Daerah berpengaruh signifikan terhadap Manajemen Pemberdayaan Aset Daerah. Nilai T Statistik diperoleh angka 2,543 dengan angka probabilitas sebesar 0,0113. dengan menggunakan tingkat kesalahan 5 % maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis 1 **diterima** yang berarti Sistem Pengendalian aset daerah berpengaruh signifikan terhadap manajemen pemberdayaan aset daerah, dengan demikian dalam suatu proses manajemen pemberdayaan aset daerah maka sistem pengendalian atas aset daerah tersebut sangat mutlak perlu karena sistem pengendalian memberikan suatu kendali yang terarah dalam mewujudkan proses pemberdayaan aset yang dapat dipertanggungjawabkan.
2. Hasil uji hipotesis 2 (H-2). Sistem Akuntansi Aset Daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap Manajemen Pemberdayaan Aset Daerah. Nilai T Statistik diperoleh angka 1,823 dengan angka probabilitas sebesar 0,0689. dengan menggunakan tingkat kesalahan 5 % maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis 2 **ditolak** yang berarti Akuntansi aset daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap manajemen pemberdayaan aset daerah, dengan demikian terlihat bahwa suatu proses pemberdayaan aset



tidak langsung ditentukan oleh suatu sistem akuntansi aset, akan tetapi sistem akuntansi hanya dapat mempengaruhi proses pemberdayaan aset apabila sistem akuntansi aset tersebut dapat menunjang proses pengendalian manajemen dari aset dimaksud. Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa suatu pemberdayaan aset daerah dapat di berdayakan apabila sistem pengendalian manajemen aset tersebut dilakukan dengan ditunjang oleh suatu sistem akuntansi aset yang baik.

3. Hasil uji hipotesis 3 (H-3). Manajemen Pemberdayaan Aset Daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Aset Daerah. Nilai T Statistik diperoleh angka 0,447 dengan angka probabilitas sebesar 0,6551. dengan menggunakan tingkat kesalahan 5 % maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis 3 **ditolak** yang berarti pemberdayaan aset daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja aset daerah. Keadaan ini memberikan gambaran bahwa pengukuran kinerja aset yang ada di daerah Lamongan karena masih baru sehingga secara kuantitatif belum menunjukkan suatu nilai prosentase maupun absolut yang berarti terhadap keseluruhan nilai aset daerah yang ada seperti nampak pada lampiran 17 dan lampiran 16B.
4. Hasil uji hipotesis 4 (H-4). Kinerja Aset Daerah berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah. Nilai T Statistik diperoleh angka 4,564 dengan angka probabilitas sebesar 0,0000. dengan menggunakan tingkat kesalahan 5 % maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis 4 **diterima** yang berarti Kinerja aset daerah berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah. Kondisi ini menggambarkan bahwa peranan daripada hasil pengelolaan suatu aset daerah dengan pola pemberdayaan yang terkendali dapat memberikan sumbangsih pendapatan yang cukup berarti terhadap pendapatan asli daerah tersebut.
5. Hasil uji hipotesis 5 (H-5). Sistem Akuntansi Aset Daerah berpengaruh signifikan terhadap Sistem Pengendalian Aset Daerah. Nilai T Statistik diperoleh angka 6,009 dengan angka probabilitas sebesar 0,0000. dengan menggunakan tingkat kesalahan 5 % maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis 5 **diterima** yang berarti Sistem Akuntansi aset daerah berpengaruh signifikan terhadap Sistem Pengendalian aset daerah. Dapat dijelaskan bahwa suatu sistem pengendalian manajemen atas aset suatu daerah hanya dapat berjalan dengan baik dan memberikan dampak

pengendalian yang berarti apabila ditunjang oleh suatu sistem akuntansi yang baik. Atau dapat dikatakan bahwa tanpa sistem akuntansi aset daerah yang baik, maka suatu sistem pengendalian manajemen terhadap aset tersebut tidak mungkin berjalan dengan baik.

6. Hasil uji hipotesis 6 (H-6). Sistem Pengendalian Aset Daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Aset Daerah. Nilai T Statistik diperoleh angka 0,209 dengan angka probabilitas sebesar 0,8345. dengan menggunakan tingkat kesalahan 5 % maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis 6 **ditolak** yang berarti Sistem Pengendalian aset daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja aset daerah. Hal ini menunjukkan bahwa dalam pengukuran kinerja aset suatu daerah tidak langsung dapat ditunjukkan dari adanya keberhasilan suatu sistem pengendalian manajemen atas aset tersebut. Hal ini disebabkan karena pengukuran kinerja aset ditentukan oleh bagaimana perkembangan kuantitatif dari nilai aset itu sendiri.
7. Hasil uji hipotesis 7 (H-7). Sistem Akuntansi Aset Daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Aset Daerah. Nilai T Statistik diperoleh angka 0,408 dengan angka probabilitas sebesar 0,6834. dengan menggunakan tingkat kesalahan 5 % maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis 7 **ditolak** yang berarti Sistem Akuntansi aset daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja aset daerah. Kondisi ini menunjukkan bahwa pengukuran kinerja aset adalah menunjukkan nilai absolut dari aset tersebut yang telah tercatat dengan demikian apabila dilihat dalam lampiran 16 dan lampiran 17 maka nampak bahwa posisi hasil pencatatan akuntansi atas aset daerah telah memberikan gambaran yang nyata atas perkembangan aset tersebut. Tetapi tidak dapat memberikan suatu gambaran perkembangan angka absolut dari aset itu sendiri karena perhitungan kinerja aset hanya dipergunakan perbandingan dari angka aset. Dan oleh karena nilai aset wisata daerah di Lamongan baru berkembang dalam tiga tahun terakhir, maka apabila diukur kinerjanya terhadap total aset daerah di Lamongan menunjukkan suatu hasil yang belum berarti.
8. Hasil uji hipotesis 8 (H-8). Sistem Pengendalian Aset Daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah. Nilai T Statistik diperoleh angka 1,833 dengan angka probabilitas sebesar 0,0674. dengan menggunakan tingkat kesalahan 5 % maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis 8 **ditolak** yang berarti Sistem Pengendalian aset daerah tidak

berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah. Kondisi ini memberikan gambaran bahwa sistem pengendalian manajemen terhadap aset suatu daerah tidak dapat menunjukkan suatu pengaruh langsung terhadap pendapatan asli daerah tersebut, akan tetapi sistem pangendalian itu hanya dapat memberikan suatu proses yang baik dalam pemberdayaan aset daerah tersebut.

9. Hasil uji hipotesis 9 (H-9). Sistem Akuntansi Aset Daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah. Nilai T Statistik diperoleh angka 0,964 dengan angka probabilitas sebesar 0,3355. dengan menggunakan tingkat kesalahan 5 % maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis 9 **ditolak** yang berarti Sistem Akuntansi aset daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah. Kondisi ini memberikan gambaran bahwa keberhasilan dalam sistem akuntansi aset daerah hanya dapat membantu suatu sistem pengendalian manajemen atas aset daerah tersebut yang pada akhirnya dapat memberikan suatu program pemberdayaan aset daerah yang baik, dengan demikian sistem akuntansi aset daerah tidak dapat memberikan pengaruh langsung terhadap pendapatan asli daerah.

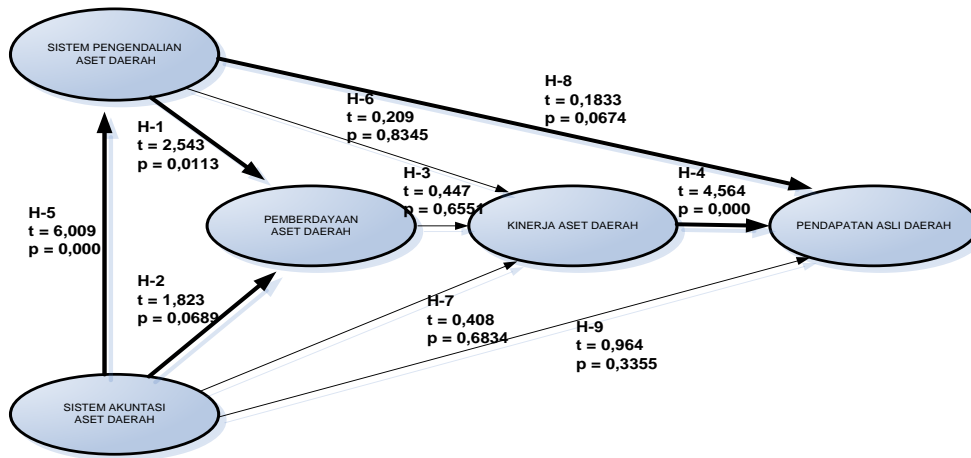
## PEMBAHASAN

### Pembahasan

Penelitian ini telah menemukan suatu temuan yang cukup memberikan makna dan arti dari semua gambaran hipotesis yang dikemukakan pada bagian lain dari penelitian ini, bahwa : Pemberdayaan aset daerah cukup signifikan dipengaruhi oleh variabel Sistem pengendalian aset daerah dan variabel sistem akuntansi aset daerah dan selain itu, ditemukan pula bahwa, variabel sistem pengendalian aset daerah dapat menunjukkan cukup signifikan terhadap pendapatan asli daerah dalam suatu model atau tata hubungan sebagai berikut :

Gambar 9

## Tata Hubungan antar Variabel



Temuan ini menunjukkan bahwa dalam pengelolaan aset daerah, terutama aset wisata daerah, maka niscaya akan dapat memberikan suatu manfaat besar dalam sistem pemberdayaan aset daerah yang dapat memberikan manfaat besar untuk peningkatan pendapatan asli daerah tersebut.

#### a. Pengaruh Sistem Pengendalian Aset Daerah terhadap Pemberdayaan Aset Daerah

Dalam penelitian ini temuan yang diperoleh dari hasil analisa *Result for inner weights* dalam pengolahan data dengan PLS, ditemukan bahwa dalam hubungan antara sistem pengendalian aset daerah terhadap pemberdayaan aset daerah telah menunjukkan hasil uji t-statistik adalah 2.543 dengan dengan standart deviasi sebesar 0,182 menunjukkan bahwa pengaruh kedua variabel ini sangat kuat , hal ini ditunjukkan juga dengan besarnya propabilitas 0,0113, menandakan bahwa dalam pemberdayaan aset daerah sangat tergantung pada suatu sistem pengendalian aset daerah yang baik, atau dapat dikatakan bahwa dengan sistem pengendalian aset daerah yang baik, maka akan terbentuk pemberdayaan aset daerah yang lebih berdaya guna bagi daerah tersebut. Apabila dilihat pada variabel sistem pengendalian aset daerah itu sendiri, maka indikator yang sangat menentukan keberhasilan sistem pengendalian aset daerah itu adalah Sistem informasi aset daerah dan efektifitas dari

pengendalian aset daerah itu sendiri. Hal ini telah dibuktikan dalam Bab.V, bahwa *Composite reliability* dari indikator sistem informasi manajemen (SIM) adalah sebesar 0,903 sedangkan efektifitas pengendalian manajemen aset daerah sebesar 0,889 menunjukkan bahwa dalam sistem pengendalian manajemen aset daerah sangat ditentukan oleh bagaimana pemerintah daerah harus dapat membentuk sistem informasi manajemen yang baik dalam pengelolaan aset daerah serta menjaga efektifitas dari jalannya manajemen aset daerah tersebut, apabila aset daerah akan diberdayakan atau demi pemberdayaan aset daerah. Selain itu dengan hasil *composite Reliability* dari variabel sistem pengendalian aset daerah sebesar 1,000 dan pemberdayaan aset daerah sebesar 0,918 menunjukkan bahwa variabel-variabel ini memiliki kontribusi yang sangat besar bagi usaha-usaha peningkatan dan pemberdayaan aset daerah diwilayah kabupaten Lamongan.

Dalam kondisi riil yang ada pada daerah kabupaten Lamongan, maka terlihat bahwa pemerintah daerah telah dapat menunjukkan adanya suatu keputusan yang sangat positif dalam program pemberdayaan aset daerah demi terwujudnya usaha peningkatan pendapatan asli daerah yang lebih meningkat. Hal ini dapat dilihat pada data peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) yang meningkat tajam pada saat usaha pemerintah daerah kabupten Lamongan mulai memberdayakan aset wisata daerahnya sejak tahun 2002 dengan nilai pendapatan asli daerah sebesar Rp.25.453.445.000 naik menjadi Rp. 55.639.143.000 pada tahun 2007 atau naik sebesar : 118,59%, kondisi ini menyebabkan suatu perubahan peta ekonomi lokal (PEL) di Kabupetn Lamongan berubah drastis dari masyarakat yang agraris menjadi masyarakat yang lebih mengandalkan pendapatan dari sektor perdagangan dan usaha jasa lainnya, selanjutnya hal ini digambarkan dalam unsur pendapatan asli daerah, baik untuk pajak daerah maupun retribusi daerah serta penerimaan lainnya yang meningkat sangat tajam Peningkatan penerimaan daerah dalam bentuk Pendapatan Asli Daerah (PAD) ini menunjukkan suatu kondisi yang sangat berpengaruh terhadap peningkatan ekonomi kabupaten Lamongan secara keseluruhan yang pada akhirnya meningkatkan kemampuan ekonomi daerah ini menjadi suatu daerah yang pertumbuhannya sangat besar di Propinsi Jawa Timur. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pengaruh dari pemberdayaan aset wisata daerah sangat memberikan suatu perubahan ekonomi yang cukup signifikan dalam kabupaten lamongan yang pada akhirnya perubahan tersebut nampak pada peningkatan pendapatan asli daerah.

## **b. Pengaruh Sistem Akuntansi Aset Daerah terhadap Pemberdayaan Aset Daerah**

Hasil penelitian yang ditunjukkan dari data hubungan antar variabel diatas serta hasil dari *result for inner weights* yang diperoleh dari pengolahan data statistik menggambarkan bahwa, dalam program pemberdayaan aset daerah, maka suatu sistem akuntansi aset daerah yang baik akan lebih mendukung program tersebut, hal ini didukung dengan data hasil penelitian yang menggambarkan kuatnya hubungan dari kedua variabel ini dimana t-statistik yang diperoleh sebesar 1.823 dengan standart deviasi sebesar 0,165 menunjukkan bahwa system akuntansi aset daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap pemberdayaan aset daerah ditunjukkan dengan besarnya propabilitas 0,0689 .

Seperti diketahui bahwa suatu aset daerah apabila ditata dalam suatu data akuntansi aset yang baik dan tertib maka niscaya data akuntansi tersebut dapat memberikan gambaran yang rinci dan jelas tentang arti dari aset daerah tersebut serta dapat dipergunakan untuk berbagai kemungkinan pengambilan keputusan yang menguntungkan.

Dalam keadaan sebenarnya yang dilihat di Kabupaten Lamongan, bahwa semua aset daerah yang dikelola dalam manajemen aset daerah terutama aset wisata daerah yang kerjasamakan (program kemitraan) dengan pihak swasta Nasional, menunjukkan adanya suatu gambaran data akuntansi aset yang transparan dan dapat diandalkan penggunaannya bagi pemerintah kabupaten Lamongan untuk memberdayakan aset tersebut serta untuk pengambilan keputusan lainnya. Apabila ditelaah proses akuntansi aset daerah di kabupaten Lamongan saat ini, memang ada suatu kesenjangan antara pihak satuan kerja pemerintah daerah otonom (SKPD) dengan pihak swasta nasional dalam proses pengelolaan akuntansi aset wisata daerah, hal ini karena proses SIMBADA OTODA yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah untuk inventarisasi aset di daerah otonom, sepenuhnya belum dilakukan dengan baik oleh pemerintah kabupaten Lamongan. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa akuntansi aset daerah yang ternyata mempunyai pengaruh dalam pemberdayaan aset daerah tersebut masih harus ditingkatkan lagi dimasa yang akan datang. Semua uraian diatas bilamana dilihat dari hasil pengolahan data dengan PLS dalam *result for inner weights* yang menunjukkan bahwa indikator sistem informasi akuntansi, sistem pencatatan akuntansi serta sistem pelaporan akuntansi aset daerah mempunyai hasil uji t-statistik yang sangat besar dengan propabilitas yang signifikan yaitu : Sistem informasi akuntansi aset daerah (Y3) besarnya t-

statistik 5.323 dengan propabilitas 0,000 ,sistem pencatatan akuntansi aset daerah (Y4) besarnya t-statistik 2.718 dengan propabilitas 0,0068 dan sistem pelaporan akuntansi aset daerah (Y5) besarnya t-statistik 6.115 dengan propabilitas 0,000 hal ini menunjukkan hubungan indikator-indikator tersebut diatas terhadap variabel sistem akuntansi aset daerah cukup signifikan, artinya apabila sistem akuntansi aset daerah yang sangat dibutuhkan dalam proses pemberdayaan aset daerah, maka mutlak diperlukan adanya indikator diatas yang dilaksanakan dengan baik.

#### **c. Pengaruh Pemberdayaan Aset Daerah terhadap Kinerja Aset Daerah**

Dalam pembahasan ini, nampak bahwa hasil pengolahan data statistik menunjukkan bahwa kedua variabel tersebut memiliki hubungan akan tetapi tidak signifikan. Hal ini ditunjukkan dengan hasil dari t-statistik yang diperoleh sebesar 0.447 dengan propabilitas sebesar 0,6551, menunjukkan bahwa hubungan kedua variabel tersebut tidak saling mendukung dalam uji statistik, walaupun hasil *composite reliability*nya 0,918 atau dapat dikatakan bahwa dapat diterima sebagai variabel yang ada pengaruh dalam hubungan analisa, akan tetapi dapat dijelaskan bahwa suatu aset yang telah diberdayakan, maka niscaya kinerja aset tersebut akan nampak apabila telah aset daerah tersebut telah dikelola baru nampak bahwa kinerja aset daerah dimaksud memberikan hasil. Semua ini nampak dalam hubungan dari lanjutan hipotesa penelitian ini, dimana ternyata pada hipotesa yang menggambarkan hubungan kinerja aset dengan pendapatan asli daerah, memiliki hubungan yang signifikan.

#### **d. Pengaruh Kinerja Aset Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah**

Pemberdayaan aset daerah yang pada akhirnya dapat menggambarkan kinerja aset daerah, maka kinerja aset daerah yang baik menggambarkan suatu hubungan yang bisa dibuktikan dengan adanya suatu peningkatan pendapatan daerah yang nyata. Hal ini terbukti bahwa hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hubungan kedua variabel ini sangat signifikan dengan hasil uji t-statistik sebesar 4.564 dengan propabilitas 0,000 menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah di kabupaten Lamongan sangat dipengaruhi oleh adanya kinerja aset daerah yang meningkat dari tahun ke tahun, dimana ternyata dengan adanya peningkatan kinerja aset daerah diikuti dengan peningkatan pendapatan asli daerah yang cukup signifikan. Dalam Bab V hal ini juga telah dibuktikan dengan uji *reliability* dimana *composite reliability* kinerja aset daerah sebesar

0,979 sedangkan pendapatan asli daerah sebesar 1,000, maka kinerja aset daerah berpengaruh signifikan terhadap pendapatan aset daerah.

Semua keberhasilan peningkatan pendapatan asli daerah di kabupaten Lamongan ternyata meningkat sangat signifikan setelah adanya suatu program pemberdayaan aset daerah terutama aset wisata daerah di kabupaten Lamongan secara kerja sama kemitraan dengan pihak swasta Nasional.

**e. Pengaruh Sistem Akuntansi Aset Daerah terhadap Sistem Pengendalian Aset Daerah**

Dari hasil penelitian yang diperoleh dengan pengolahan data statistik, maka dapat dikatakan bahwa kedua variabel ini memiliki hubungan yang sangat signifikan terutama dalam membentuk pemberdayaan aset daerah, hal ini tampak dalam hasil uji t-statistik sebesar 6.009 dengan probabilitas sebesar 0,000, hal ini menggambarkan bahwa diantara kedua variabel ini memiliki hubungan yang sangat signifikan, hal ini didukung pula dengan hasil uji komposit reliabilitas dari masing-masing variabel sebesar 1,000 maka dapat dikatakan bahwa kekuatan variabel ini sangat dominan dalam pembuktian kemandirian variabel.

Dalam pelaksanaan pemberdayaan aset daerah di kabupaten lamongan, maka kedua variabel ini secara empirik masih perlu ditingkatkan lagi, hal ini mengingat bahwa sampai dengan penelitian ini dilakukan, maka di kabupaten lamongan masih sedang melakukan suatu program inventarisasi aset daerah dalam rangka SIMBADA OTODA yang dicanangkan oleh pemerintah Jawa Timur.

**f. Pengaruh Sistem Pengendalian Aset Daerah terhadap Kinerja Aset Daerah, serta Pengaruh Sistem Akuntansi Aset Daerah terhadap Kinerja Aset Daerah**

Dalam pembahasan hubungan antara sistem pengendalian aset daerah (Y1) dengan sistem akuntansi aset daerah (Y2), nampak bahwa kedua variabel ini memiliki pengaruh yang cukup signifikan dalam membentuk pemberdayaan aset daerah. Selanjutnya suatu aset daerah yang telah diberdayakan melalui konsep pemberdayaan, maka akan memberikan suatu manfaat yang akan menunjukkan bagaimana kinerja aset tersebut bekerja dalam hubungan dengan hasil pemberdayaan dimaksud. Dalam hal ini apabila dilihat dari hasil pengolahan data statistik, maka ternyata pengaruh kedua variabel diatas terhadap kinerja aset daerah dapat diterima, akan tetapi tidak cukup signifikan.



Hal ini dapat digambarkan dengan hasil uji t-statistik sebesar 0.209 untuk sistem pengendalian aset daerah terhadap kinerja aset daerah dengan propabilitas sebesar 0,8345 dan 0.408 untuk sistem akuntansi aset daerah terhadap kinerja aset daerah dengan propabilitas sebesar 0,6834, yang ternyata hubungan kedua variabel diatas terhadap kinerja aset daerah dapat diterima tetapi tidak signifikan.

**g. Pengaruh Sistem Pengendalian Aset Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

Apabila dilihat hubungan kedua variabel ini, maka dapat dikatakan bahwa hubungan ini memberikan dukungan yang kuat bagi dapat diterimanya hubungan antara variabel sistem pengendalian aset daerah dan sistem akuntansi aset daerah terhadap kinerja aset daerah. Hal ini dapat dijelaskan bahwa dengan adanya suatu pengendalian aset daerah yang baik dan terarah dengan dukungan dari sistem akuntansi aset daerah yang baik, maka akan memberikan dampak pada pemberdayaan aset daerah yang berhasil, dengan demikian maka hasil pengelolaan aset daerah yang telah diberdayakan dengan baik apabila dikelola dengan prinsip-prinsip manajemen yang baik, maka akan mendatangkan suatu peningkatan hasil atau memberikan keuntungan ekonomis bagi daerah yang memiliki aset tersebut.

Dari hasil uji statistik atas hubungan kedua variabel diatas, didapati uji t-statistik sebesar 1.833 dengan propabilitas sebesar 0,0674 dengan demikian system pengendalian aset daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah, hal ini bila dilihat composite reliabilitynya yang menunjukkan nilai sebesar 1.000, maka dapat dikatakan bahwa kedua variabel memiliki peran dalam proses pemberdayaan aset daerah untuk peningkatan pendapatan asli daerah, sesuai dengan maksud dan tujuan utama dari penelitian ini.

**h. Pengaruh Sistem Akuntansi Aset Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah**

Didalam konsep pemberdayaan aset daerah, maka telah disebutkan bahwa peranan sistem akuntansi aset daerah maupun sistem pengendalian manajemen aset daerah memiliki peranan yang besar demi suksesnya program pemberdayaan aset dimaksud. Berdasarkan dari pernyataan diatas, maka dapat dikatakan bahwa sistem akuntansi aset daerah tidak memiliki hubungan

langsung dengan peningkatan pendapatan asli daerah, akan tetapi hubungan tersebut melalui suatu sistem pengendalian aset daerah yang harus dilakukan dengan baik terlebih dahulu, maka dengan demikian hasil uji statistik atas hubungan ini juga dapat dilihat dari *result fo inner weights* yang diperoleh dari pengolahan data dengan PLS didapat sebagai berikut : t-statistik sebesar 0.964 dengan propabilitas sebesar 0,3355 hal ini menunjukkan suatu hubungan yang dapat diterima walaupun tidak signifikan, karena *composite reliability* nya sebesar 1,000 dengan demikian memiliki tingkat reliabilitas yang cukup tinggi dalam penelitian ini. Akan tetapi bila dilihat hubungan tidak langsung, bahwa suatu peningkatan pendapatan asli daerah yang diperoleh dari pemberdayaan aset daerah, maka dapat dikatakan bahwa sistem akuntansi aset daerah memiliki peran yang cukup dalam konsep pemberdayaan tersebut, hal ini dibuktikan dengan pengaruh sistem akuntansi aset daerah dimaksud terhadap variabel yang mendukung peningkatan pendapatan asli daerah. Atau dapat dikatakan bahwa kedua variabel ini memiliki hubungan satu sama lainnya akan tetapi hubungan tersebut bukan merupakan hubungan langsung, tetapi hubungan tidak langsung.

### **Implikasi Teoritis dan Praktis dari Penelitian**

Pemberdayaan aset daerah sebagai suatu isu sentral dari penelitian ini yang ditujukan sebesar-besarnya dalam langkah peningkatan pendapatan asli daerah, ternyata dapat dibuktikan dari hubungan antar variabel yang diusulkan dalam penelitian ini. Oleh karena itu, maka program pemberdayaan aset daerah yang akan dilakukan harus memiliki dasar yang kuat dalam rancangan program tersebut terutama menyangkut sistem akuntansi aset daerah maupun sistem pengendalian aset daerah dengan segala indikatornya.

Suatu implikasi ekonomi yang muncul dari hasil pnelitian ini menunjukkan besarnya kontribusi teoritis dari rancangan penelitian ini terhadap sistem pemberdayaan aset daerah yang akhirnya mendatangkan suatu peningkatan pendapatan asli daerah yang pada akhirnya akan membuat suatu pola pemberdayaan aset daerah yang terkontrol dalam sistem pengendalian manajemen aset daerah yang baik, transparan dan bertanggung jawab. Lebih dari pada itu adalah dengan validitas dan reliabilitas data yang diperoleh dan diuji dengan alat uji statistik yang dikemukakan diatas, maka dapat dikatakan bahwa usefulness serta orisinalitas dari temuan diatas memberikan suatu implikasi teoritis yang besar bagi terwujudnya suatu program pemberdayaan aset secara lebih luas.

Suatu implikasi manajerial yang bisa diperoleh dari penelitian ini, adalah dapat memberikan masukan berarti bagi diselenggarakannya suatu proses manajemen aset daerah yang lebih baik dan dapat dipertanggung jawabkan dalam sistem pengendalian manajemen aset yang didukung oleh tata kelola aset daerah yang bersih, serta dalam suatu sistem akuntansi aset daerah yang tertib dan dapat memberikan interpretasi atas semua perubahan aset daerah yang terjadi, dan sebagai dasar pengambilan keputusan bagi pemerintah daerah dalam mengatur manajemen aset daerah dimasa yang akan datang.

Dampak implikasi yang sangat berarti atas kedua implikasi diatas, baik implikasi ekonomis maupun implikasi managerial, pada prinsipnya bermuara pada peningkatan pendapatan asli daerah secara bertanggung jawab. Dengan demikian maka peningkatan pendapatan masyarakat dan peningkatan taraf hidup masyarakat daerah tersebut menjadi suatu ukuran yang dapat dipakai sebagai hal yang positif dalam menilai hasil penelitian ini, hal ini seperti tergambar dalam lampiran.12 yang menggambarkan begitu besarnya peningkatan pendapatan perkapita masyarakat kabupaten Lamongan dengan adanya peningkatan pendapatan asli daerah yang terjadi selama periode penelitian ini.

### **Temuan-Temuan Penting**

Beberapa hasil temuan penting dari penelitian ini dapat dijelaskan antara lain sebagai berikut :

Bahwa penelitian ini mendukung beberapa penelitian yang dilakukan terdahulu antara lain mendukung study Mardiasmo (2002), Sidik (2002) dan Abimanyu (2003) yang menjelaskan bahwa dalam pelaksanaan desentralisasi fiskal, maka kebijakan pengelolaan anggaran belanja bagi daerah, baik dalam bentuk dana perimbangan maupun dana alokasi khusus agar diupayakan tetap konsisten dengan kebijakan fiskal nasional, hal ini akan merangsang pemerintah daerah untuk lebih mengoptimalkan pendapatan daerahnya sendiri melalui sumber pendapatan dari daerahnya sendiri (kemandirian anggaran). Selain itu penelitian ini juga memberikan gambaran tentang pentingnya suatu kebijakan pemerintah untuk lebih meningkatkan pendapatan regional dari masyarakatnya melalui peningkatan sumber-sumber pendapatan masyarakat lokal lebih penting dari pada upaya pemerintah untuk meningkatkan surplus neraca

perdagangan yang belum tentu langsung bisa dinikmati oleh masyarakat secara langsung (Burtless, Gary – Spring, 1995, hal 63-84).

Sedangkan suatu temuan penting juga tentang prinsip pengendalian manajemen yang strategis yang diharapkan dalam penelitian ini untuk menunjang sistem pengendalian manajemen aset daerah yang baik dan berhasil digambarkan oleh William F. Glueck dan Lawrence R. Jauch-1984, yang menyatakan bahwa prinsip pengendalian manajemen yang terintegrasi dalam manajemen kontrol sistem yang baik harus disesuaikan dengan perubahan struktur lingkungan dan diterapkan secara seksama, meliputi : Perencanaan strategis, pelaksanaan yang terstruktur dan pertanggung jawaban manajemen yang baik dapat dipercaya . Hal ini telah dibuktikan oleh pemerintah kabupaten Lamongan sehingga semua peningkatan pendapatan asli daerah ini dapat terukur dengan baik, dan bermanfaat bagi peningkatan pendapatan masyarakat secara keseluruhan.

Penelitian ini juga mendukung hasil penelitian Abdul Halim,dkk(2003) yang memberikan pola bentuk pengendalian dengan memanfaatkan informasi untuk melakukan proses pengendalian yang efektif. Dalam hal ini nampak bahwa pemerintah kabupaten lamongan telah cukup jeli dalam memanfaatkan dan mengendalikan informasi yang berguna menjadi suatu keputusan manajerial aset daerah yang mendatangkan peningkatan kinerja pemerintahan daerah di kabupaten Lamongan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir.

### **Keterbatasan Studi**

Diakui bahwa penelitian ini belum optimal dalam mengungkapkan berbagai issue serta telaah yang luas mengenai sistem pemberdayaan aset daerah dengan mengandalkan sistem pengendalian manajemen aset daerah dan sistem akuntansi aset daerah sistem, oleh karena itu ada beberapa keterbatasan studi ini yang dapat dikemukakan, yaitu :

- a. Responden dalam studi ini adalah manajemen pemerintahan daerah serta pengelola aset daerah yang dikerjasamakan dengan pihak swasta nasional di Lamongan , dengan demikian ada keterbatasan informasi yang bisa menjadi kendala, terutama menyangkut tugas pada pelaksana aset daerah yang diteliti. Hal ini memiliki keterbatasan dalam hal keterbukaan informasi mengenai kebijakan dan menyangkut strategi politik pemerintah daerah di kabupaten Lamongan.

- b. Bahwa studi ini hanya dilakukan pada satu daerah yang telah berhasil melakukan pengelolaan aset daerah dalam konsep pemberdayaan aset secara terpadu dalam peningkatan pendapatan asli daerahnya, dan belum pada daerah yang telah mengelola aset daerah tetapi belum menunjukkan keberhasilannya, dengan demikian ada keterbatasan variabel yang mungkin bisa menunjukkan hal-hal yang berhubungan dengan kendala pengendalian atau sistem pemberdayaan aset daerah secara universal.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

### **Kesimpulan**

Dengan mendasari tujuan penelitian ini dan berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka beberapa kesimpulan yang dapat diambil dari disertasi ini adalah :

- a. Sistem pengendalian aset daerah berpengaruh signifikan terhadap pemberdayaan aset daerah., dengan demikian dalam suatu proses manajemen pemberdayaan aset daerah maka sistem pengendalian atas aset daerah tersebut sangat mutlak perlu karena sistem pengendalian memberikan suatu kendali yang terarah dalam mewujudkan proses pemberdayaan aset yang dapat dipertanggungjawabkan.
- b. Sistem akuntansi aset daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap pemberdayaan aset daerah, dengan demikian terlihat bahwa suatu proses pemberdayaan aset tidak langsung ditentukan oleh suatu sistem akuntansi aset, akan tetapi sistem akuntansi hanya dapat mempengaruhi proses pemberdayaan aset apabila sistem akuntansi aset tersebut dapat menunjang proses pengendalian manajemen dari aset dimaksud. Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa suatu pemberdayaan aset daerah dapat di berdayakan apabila sistem pengendalian manajemen aset tersebut dilakukan dengan ditunjang oleh suatu sistem akuntansi aset yang baik.
- c. Pemberdayaan aset daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja aset daerah, Keadaan ini memberikan gambaran bahwa pengukuran kinerja aset yang ada didaerah Lamongan karena masih baru sehingga

secara kuantitatif belum menunjukkan suatu nilai prosentase maupun absolut yang berarti terhadap keseluruhan nilai aset daerah.

- d. Kinerja aset daerah berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah, Kondisi ini menggambarkan bahwa peranan daripada hasil pengelolaan suatu aset daerah dengan pola pemberdayaan yang terkendali dapat memberikan sumbangsih pendapatan yang cukup berarti terhadap pendapatan asli daerah tersebut.
- e. Sistem akuntansi aset daerah berpengaruh signifikan terhadap sistem pengendalian aset daerah, dapat dijelaskan bahwa suatu sistem pengendalian manajemen atas aset suatu daerah hanya dapat berjalan dengan baik dan memberikan dampak pengendalian yang berarti apabila ditunjang oleh suatu sistem akuntansi yang baik. Atau dapat dikatakan bahwa tanpa sistem akuntansi aset daerah yang baik, maka suatu sistem pengendalian manajemen terhadap aset tersebut tidak mungkin berjalan dengan baik.
- f. Sistem pengendalian aset daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja aset daerah, hal ini menunjukkan bahwa dalam pengukuran kinerja aset suatu daerah tidak langsung dapat ditunjukkan dari adanya keberhasilan suatu sistem pengendalian manajemen atas aset tersebut. Hal ini disebabkan karena pengukuran kinerja aset ditentukan oleh bagaimana perkembangan kuantitatif dari nilai aset itu sendiri.
- g. Sistem akuntansi aset daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja aset daerah, kondisi ini menunjukkan bahwa pengukuran kinerja aset adalah menunjukkan nilai absolut dari aset tersebut yang telah tercatat dengan demikian apabila dilihat dalam lampiran 16 dan lampiran 17 maka nampak bahwa posisi hasil pencatatan akuntansi atas aset daerah telah memberikan gambaran yang nyata atas perkembangan aset tersebut. Tetapi tidak dapat memberikan suatu gambaran perkembangan angka absolut dari aset itu sendiri karena perhitungan kinerja aset hanya dipergunakan perbandingan dari angka aset. Dan oleh karena nilai aset wisata daerah di Lamongan baru berkembang dalam tiga tahun terakhir, maka apabila diukur kinerjanya terhadap total aset daerah di Lamongan menunjukkan suatu hasil yang belum berarti.
- h. Sistem pengendalian aset daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah, kondisi ini memberikan gambaran bahwa sistem pengendalian manajemen terhadap aset suatu daerah tidak dapat

menunjukkan suatu pengaruh langsung terhadap pendapatan asli daerah tersebut, akan tetapi sistem pengendalian itu hanya dapat memberikan suatu proses yang baik dalam pemberdayaan aset daerah tersebut.

- i. Sistem akuntansi aset daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah, Kondisi ini memberikan gambaran bahwa keberhasilan dalam sistem akuntansi aset daerah hanya dapat membantu suatu sistem pengendalian manajemen atas aset daerah tersebut yang pada akhirnya dapat memberikan suatu program pemberdayaan aset daerah yang baik, dengan demikian sistem akuntansi aset daerah tidak dapat memberikan pengaruh langsung terhadap pendapatan asli daerah.

### **Saran**

Berdasarkan beberapa kesimpulan diatas serta melihat hasil penelitian yang telah di bahas pada bagian pembahasan dibagian lain dari disertasi ini, maka saran yang dapat diberikan sebagai bahan masukan selanjutnya sebagai berikut :

- a. Disarankan kepada pemerintah daerah yang ada di Kabupaten Lamongan serta daerah otonom lainnya di Indonesia, bahwa Pemberdayaan aset daerah dengan mengandalkan suatu sistem pengendalian manajemen yang didukung dengan sistem akuntansi atas semua aset daerah, perlu untuk diadakan secara cermat dan bertanggung jawab. Hal ini agar tercipta suatu sistem informasi aset daerah yang terpadu dan dapat dipakai sebagai dasar pengambilan kebijakan daerah serta sebagai dasar dari penyusunan rencana anggaran dan pendapatan daerah yang dapat dipakai sebagai alat pengendalian anggaran didaerah otonom.
- b. Agar semua aset daerah yang telah di akuntansikan dengan baik dan dikendalikan dalam suatu manajemen aset daerah, maka perlu diukur kinerja aset tersebut secara terjadwal pada tiap periode anggaran, agar hal ini memberikan gambaran yang luas mengenai kinerja masing-masing aset yang dimiliki daerah tersebut guna perencanaan dan pengendalian aset daerah dimasa yang akan datang.
- c. Untuk penelitian lebih lanjut, agar dapat mengembangkan variabel-variabel lain yang dapat mempengaruhi proses pemberdayaan aset

daerah serta menemukan indikator-indikator lainnya yang lebih fokus pada sistem pengendalian asset daerah serta dapat mengembangkan kinerja asset daerah.

- d. Memberikan ruang yang lebih terbuka akan peranan teori manajemen asset dalam menemukan sistem pemberdayaan asset yang lebih baik dimasa yang akan datang.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim, (2002), “ *Akuntansi Keuangan Daerah*”. Salemba Empat, Jakarta.
- Abdul Halim-Achmad Tjahjono, Muh Faakhri Husein,(2003),” *Sistim Pengendalian Manajemen*” Akademi Manajemen Perusahaan YKPN, Yogyakarta.
- Ahmad Subagyo,(2007),”*Study Kelayakan*”- Teori & Aplikasi, Elex Media Komputindo. Jakarta.
- Alan Barker (2000), “*Mengelola Sumber daya Manusia*” Terjemahan Salemba Empat- Jakarta.
- Anang Hidayat, (2007), “*Strategi SIX SIGMA- Kualitas dan Kinerja Bisnis*”, Elex Media Komputindo.
- Anonimous, (1995), “ *Pengenalan masalah untuk perencanaan pembangunan dalam perencanaan sebagai suatu dialog*, “ LAN – DSE. Jakarta.
- Armida,S. Alisjahbana, (1998), “ *Strategi penyelenggaraan keuangan daerah* “ : Alasan tuntutan perimbangan keuangan pusat dan daerah – Hak daerah dalam pembagian keuangan yang adil, Lembaga Penerbit FE- UI, Jakarta.
- Badan Pusat Statistik Propinsi Jawa Timur (2007), “ *Jawa Timur Dalam Angka*”, BPS- Jatim. Surabaya.
- Bambang P.S. Brojonegoro,(2002), “*Desentralisasi dan Kemandirian pengambilan keputusan*”, lembaga penerbit FE-UI, Jakarata.
- Bambang P.S. Brojonegoro, (2003), “ *Menciptakan perekonomian daerah yang kompetitif*”, Salemba Empat – FE-UI, Jakarta.



- Barata, Atep Adya dan Trihartanto, Bambang,(2004), “ **Kekuasaan Pengelolaan keuangan Negara/Daerah**”, Alex Media Komputindo- Jakarta.
- Barry, Cushing,(1983), “ **Sistim Informasi Akuntansi dan Organisasi**”, Edisi ke 3, terjemahan : Rohyat Kosasih, Penerbit Erlangga- Jakarta.
- Barry Render, Jay Heizer,( 2001), “ **Prinsip-Prinsip Manajemen Operasi**”, Salemba Empat- Jakarta.
- Bohari. ( 1995 ) : **Hukum Anggaran Negara**, Jakarta : Rajawali Pers,
- Charles.T.Horngren, (1984),“**Introduction to Manajemen Accounting**”- Prentice -Hall – Stanford University.
- Devas, Nick dkk (terjemahan Masri Maris), (1989) “ **Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia** “, UI – Press, Jakarta.
- Don R. Hansen & Maryanne M Mowen, (1999), “**Akuntansi Manajemen**”, Terjemahan, Erlangga – Jakarta.
- Eugene F.Brigham, Joel F.Houston, (2001), “ **Manajemen Keuangan**”. Erlangga- Jakarta.
- Fred R. David, (2002), “ **Strategic Management**”, Ninth Edition, Prentice-Hall, New York.
- Gasperz, Vincent, (1992), “**Teknik Analisis dalam penelitian percobaan**”, Tarsito, Bandung , 1992.
- George Ritzer-Douglas J.Goodman, (2004), “**Teori Sosiologi Modern**” – terjemahan Prenada Media, Jakarta.
- George H Bodnar, William S Hopwood, ( 1995), **Sistim Informasi Akuntansi**” – Terjemahan : Amir Abadi Jusuf & Rudi M Tambunan – Salemba Empat Jakarta.
- Gil Coutemanche, (1997), “**The New Internal Auditing**”, John Wiley & Sons, Inc, New York.
- Gunawan Widjaya, (2002), “ **Pengelolaan Harta Kekayaan Negara** “, Suatu Tinjauan Yuridis, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

- Heckert,J.B, James.D.Willson and John.B.Campbell, (1981), “ **Controllershship**”, 3th edition – John Wiley & Sons, Inc. Ohio State University.
- Hekinus Manao, (2006), “**Akuntansi & Pelaporan Keuangan Pemerintahan**”  
Direktur Informasi & Akuntansi Departemen Keuangan RI.
- Hodgetts.R.M and M.S.Wortman,Jr, (1980), “ **Administrative Policy: Text and Cases in Strategic Management**” – Prentice –Hall , New York
- Horngren, Charles, (1972), “ **Accounting Principles : Private or Public Sector.** ”, Journal of Accountancy, Mei, 1972.
- Hungtington, Samuel.P. (1997), “ **Gelombang Demokrasi Ketiga**”, PT. Pustaka Utama Grafiti, Jakarta.
- Islam, (1999),” **Desentralisasi & Perubahan struktur social, ekonomi dan politik**, Lembaga Penerbit, Erlangga – Jakarta.
- James.C.Craig & Robert.M.Grant, (1993), “**Strategic Management**”-  
Terjemahan PT.Elex Media Komputindo,Gramedia-Jakarta.
- Jogiyanto H.M.(2004), “**Metodologi Penelitian Bisnis**”BPFE- Jogjakarta.
- Joko Pramusinto,(2001),” **Otonomi dan Kemandirian daerah**” Disertasi FE-UI, Jakarta.
- Joko Widodo,(2001) “ **Good Governance** “ : Telaah dari dimensi akuntabilitas dan control birokrasi, pada era desentralisasi dan otonomi daerah, Insan Cendekia,
- Jimly Asshiddiqie, (2000), “ **Otonomi daerah dan peluang investasi** “ , Jakarta.
- Juoro, Umar (1990) “ **Persaingan global dan ekonomi Indonesia dekade 1990-an**”, Prisma No. 8 tahun XIX.
- Kuncoro, Mudrajat (1997) “ **Otonomi daerah dalam transisi**” pd seminar Mardiasmo, krisis monoter Indonesia, seminar pendalaman ekonomi Rakyat, Jakarta, 7 Mei 2002.
- Kuncoro, Mudrajad, (2004) , “ **Otonomi & Pembangunan daerah : Reformasi, perencanaan, strategi dan peluang**”, Erlangga , Jakarta.
- Mas’ud Machfoedz, (1994), “**Akuntansi Manajemen**” , BPFE- Yogyakarta.

- Mardiasmo dan Kirana Jaya, Wihana (1999) “***Pengelolaan Keuangan Daerah yang Berorientasi pada Kepentingan Public*** “ KOMPAK STIE YO, Yogyakarta, oktober 1999.
- Mardismo (2002) “***Akuntansi Sektor Publik***”, Penerbit Andi Yogyakarta.
- Mahsun. M, dkk,(2006) “***Akuntansi sector public***”. Yogyakarta BPFE, Yogyakarta.
- Nasution, Anwar (1990) “***Globalisasi produksi, pengusaha nasional dan deregulasi ekonomi***” Prisma No. 8 thn. XIX.
- Newman, W.H and Logan,J.P, (1971), “***Strategy, Policy and Central Management,***” –South Western Publishing – Cincinnati, Ohio.
- Niswonger, Warren, Reeve, Fess, (2000), “***Prinsip-Prinsip Akuntansi***”, Terjemahan : Erlangga – Jakarta.
- Pemerintah Propinsi Jawa Timur, (2005), “***SIMBADA OTODA***”, Biro perlengkapan & Administrasi Asset Daerah, Sekretariat Propinsi Jawa Timur.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2004), “***Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 152 tahun 2004 – Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah***” – Departemen Dalam Negeri.
- (2005), “***Peraturan Pemerintah (PP) Nomor : 56/2005, tentang : Sistik Informasi Keuangan Daerah.***”
- (2005), “***Peraturan Pemerintah (PP) Nomor : 58/2005, tentang : Pengelolaan Keuangan Daerah.***”
- (2005),”***Peraturan Pemerintah (PP) Nomor : 24/2005, tentang : Standart Akuntansi Pemerintahan.***”
- Raymond McLeod,Jr, (1995), “***Management Information System***”- A Study of Computer Based Information systems, 6<sup>th</sup> edition- Prentice-Hall, Inc -New Jersey.
- Raymond Mc Leod Jr & George Schell,(2004), “***Management Information System***”, Person Prentice Hall- New York.

- Revrisond Baswir, (1999), *“Akuntansi Pemerintahan Indonesia”*, BPFE-Yogyakarta.
- Republik Indonesia, Undang-undang No. 33 thn 2004, tentang: *“Perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.”*
- Riyadi dan Bratakusumah, Deddy Supriady,(2004), *“ Perencanaan Pembangunan Daerah, Strategi menggali potensi dalam mewujudkan otonomi daerah”*. PT. Gramedia Pustaka Utama , Jakarta.
- Robert. N. Anthony, John Dearden & Norton M Bedford, (1985), *“Management Control Systems”*, 5<sup>th</sup> edition , Richard Irwin, Inc, -Harfard University.
- Robert N. Anthony, Vijay Govindarajan, (2005), *“Sistim Pengendalian Manajemen”*, Terjemahan : Salemba Empat, Jakarta.
- Sondakh,L.W,(2003), *“Globalisasi dan Desentralisasi: Perspektif ekonomi local”*, Jakarta lembaga penerbit FE. Universitas Indonesia.
- Soeria Atmadja, Arifin P. ( 1986 ) : *“ Mekanisme Pertanggung jawaban Keuangan Negara”* : Suatu Tinjauan Yurudis . Jakarta : Gramedia.
- Soemardjo Tjitrosidojo,(1977), *“Controllershship”* – Bahan Kuliah Institut Ilmu Keuangan, Jakarta.
- Steven Pressman,(2002), *“Lima Puluh Pemikir Ekonomi Dunia”*, Raja Grafindo Persada – Jakarta.
- Theodorus. M. Tuanakotta, (1985), *“ Teori Akuntansi “*, LPFE- UI, Jakarta.
- Umar, Asri (1999) *“ Kerangka strategis perubahan manajemen keuangan daerah, sebagai implikasi UU-RI No. 22 Thn. 1999 dan UU-RI No. 25 Thn.1999 “*, PSPP, Jakarta Juli-Desember.
- Vernon Kam,(1990), *“ Accounting Theory”* second edition- John Wiley & Sons, California State University.
- William.F.Glueck – Lawrence.R.Jauch, (1984), *“ Strategic Management and Bussines Policy”* – Second Edition - McGraw-Hill , Inc- University of Georgia.